



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1095 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT
PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 – 2023 DALAM E-WALIDATA SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 391 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan daerah;
- d. bahwa telah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral berbasis elektronik pada e-Walidata SIPD RI;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2023 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia, perlu di tetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam negeri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 hal Implementasi SIPD;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 hal Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2023 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia.
- KEDUA : Berdasarkan hasil pemeriksaan data statistik sektoral daerah Provinsi Maluku telah memenuhi ketentuan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, maka dapat dilakukan penyebarluasan data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Data statistik sektoral daerah tingkat provinsi Maluku digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Provinsi Maluku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Mei 2025
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



HENDRIK LEWERISSA

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1095 TAHUN 2025
TENTANG
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 –
2023 DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 – 2023
DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	1.01.000091	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	4005	5869	5916	6380	2610
2	1.01.000121	Pendidikan khusus yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidikan khusus yang mengelola Dana BOS	14	14	14	14	16
3	1.01.000406	Sekolah Menengah Atas yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah menengah atas yang mengelola dana bos	282	282	282	282	284
4	1.01.000407	Sekolah Menengah Kejuruan yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah menengah kejuruan yang mengelola dana bos	113	113	113	115	115
5	1.01.000471	Unit pendidikan khusus	Unit	Jumlah Unit Pendidikan Khusus yang tersedia	14	14	14	16	16
6	1.01.000472	Unit pendidikan khusus yang layak	Kasus	jumlah unit pendidikan khusus yang layak	14	14	14	14	14

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyan kes	Unit	Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting.	0	0	0	0	165.074
2	1.02.000007	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes eksisting	Unit	Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan	0	0	0	0	165.074

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Pkesehatan pasien. Jumlah Alkes/alat penunjang medik Fasyankes eksisting					
3	1.02.000019	Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Sarana	Jumlah Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Yang Memiliki Izin	0	0	4	4	4
4	1.02.000022	Dokter Gigi	Orang	Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi. Jumlah dokter gigi	0	0	100	74	101
5	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Orang	Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis Anak	0	0	0	24	0
6	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anesthesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anesthesiologi. Jumlah Dokter Spesialis Anestesi	0	0	0	19	0
7	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Orang	Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. Jumlah Dokter Spesialis Bedah	0	0	0	22	0
8	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	Orang	Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi. Jumlah Dokter Spesialis Jantung	0	0	0	7	0
9	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	Jumlah Dokter Spesialis kebidanan	0	0	0	0	0
10	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	0	0	0	3	0
11	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	0	0	0	5	0
12	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Mata	0	0	0	7	0
13	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Paru	0	0	0	8	0
14	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam	0	0	0	26	0
15	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Radiologi	0	0	0	12	0
16	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	Orang	Jumlah Dokter Spesialis THT	0	0	0	7	0
17	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Urologi	0	0	0	1	0
18	1.02.000036	Dokter Umum	Orang	Jumlah Dokter Umum	0	0	774	461	654
19	1.02.000040	Dokumen distribusi alkes, obat. Vaksin, makanan, minuman serta faskes lainnya	Dokumen	&Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Vaksin adalah suatu bentuk perlindungan atau imunisasi yang diberikan kepada	1	0	0	1	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				seseorang untuk melindungi tubuhnya dari penyakit tertentu. Jumlah Dokumen distribusi alkes, obat, Vaksin, makanan, dan minuman ke faskes lainnya&					
20	1.02.000048	Dokumen hasil pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	0	0	0	1	18
21	1.02.000049	Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	0	0	1	1
22	1.02.000050	Dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	0	0	1	1
23	1.02.000051	Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	1	1	1	1
24	1.02.000052	Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Dokumen	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	1	1	1	1	1
25	1.02.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	1	0
26	1.02.000056	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	1	0
27	1.02.000057	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	0	0	1	0
28	1.02.000059	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0	0	11	4	8
29	1.02.000060	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	0	0	0	1	0
30	1.02.000061	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	0	0	0	1	1
31	1.02.000062	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	1	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
32	1.02.000064	Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	0	1	0
33	1.02.000070	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	0	0	1	1
34	1.02.000073	Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1	0	0	1	1
35	1.02.000079	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	54	0	81	158	165
36	1.02.000093	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	0	0	0	0	0
37	1.02.000094	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	0	0	0	0	0
38	1.02.000095	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	0	0	0	0	0
39	1.02.000099	Ibu bersalin	Orang	Jumlah Ibu Bersalin	0	27.891	36.809	36.931	37.027
40	1.02.000100	Ibu Hamil	Orang	Jumlah ibu hamil	0	44.939	39.304	38.689	38.790
41	1.02.000105	Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kuantitas	Jumlah Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0	1	1
42	1.02.000106	kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	0	8	0	1	0
43	1.02.000108	kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0	6	1	8
44	1.02.000111	Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0
45	1.02.000112	layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK):	Layanan	Jumlah layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	0	0	0	1	0
46	1.02.000114	obat dan vaksin yang disediakan	Paket	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1	0	0	3	3
47	1.02.000115	obat, Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	Paket	Jumlah obat, Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	0	0	0	1	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
48	1.02.000118	orang terduga menderita HIV	Orang	Jumlah orang terduga menderita HIV	496	392	335	564	731
49	1.02.000119	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Orang	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	141	3.726	7.935	15.202	21.622
50	1.02.000120	orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	0	0	1.077	0
51	1.02.000122	Organisasi masyarakat bidang kesehatan	Organisasi Masyarakat	Jumlah Organisasi masyarakat bidang kesehatan	0	0	0	0	0
52	1.02.000142	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	kualitas	Jumlah Penyelenggara Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0	11	1	56
53	1.02.000208	Rumah Sakit	Unit	Jumlah Rumah sakit kelas A	0	0	0	30	0
54	1.02.000209	Rumah Sakit kelas B	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas B	0	1	1	3	3
55	1.02.000214	Rumah Sakit kelas C	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas C	0	17	17	10	10
56	1.02.000215	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D	27	27	27	27	27
57	1.02.000220	Rumah Sakit kelas D	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas D	27	0	0	15	17
58	1.02.000228	Tempat tidur rumah sakit	Unit	Jumlah Tempat tidur rumah sakit	0	2.384	3.145	2.947	2.643
59	1.02.000229	Tenaga Apotek	Orang	Jumlah Tenaga Apotek	0	0	343	215	268
60	1.02.000230	Tenaga gizi	Orang	Jumlah Tenaga gizi	0	0	1.000	468	773
61	1.02.000231	Tenaga Kebidanan	Orang	Jumlah Tenaga Kebidanan	0	0	2.260	2.824	3.704
62	1.02.000232	Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	Jumlah Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	0	0	0	0	0
63	1.02.000233	Tenaga Keperawatan	Orang	&Tenaga Keperawatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para profesional perawat yang berperan dalam memberikan perawatan kesehatan langsung kepada pasien di berbagai setting, seperti rumah sakit, klinik, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan di masyarakat. Jumlah Tenaga Keperawatan&	0	0	5.722	5.644	7.507
64	1.02.000235	Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	&Tenaga Kesehatan Lainnya adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada berbagai jenis profesional kesehatan selain perawat dan dokter yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti: Ahli Gizi, Farmasis, Fisioterapis, Ahli terapi Okupasi, Tenaga Medis Laboratorium, Asisten Medis, Radiografer, Teknisi Gigi, Ahli Optometri, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainnya. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya&	0	0	0	2.845	2.600
65	1.02.000236	Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	&Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya dapat mencakup berbagai profesional kesehatan yang telah mengambil pendidikan dan pelatihan tambahan dalam bidang spesifik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Seperti: Perawat Spesialis, Farmasis Klinis, Ahli Gizi Klinis, Ahli Terapi Okupasi Spesialis, Perawat Anestesi, Perawat Pendidik Lanjutan, dan Spesialis Kesehatan Masyarakat Jumlah Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya&	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
66	1.02.000237	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	&Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah profesional kesehatan yang berfokus pada pemahaman dan penanganan isu-isu kesehatan yang terkait dengan lingkungan fisik di mana manusia tinggal dan bekerja. Tugas utama Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah memastikan kualitas lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat serta mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor lingkungan. Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan&	0	0	452	467	612
67	1.02.000238	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	&Tenaga Kesehatan Masyarakat (TKM) adalah profesional kesehatan yang berfokus pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tugas utama Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah menerapkan strategi dan program kesehatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat&	0	0	622	674	1.000
68	1.02.000239	Tenaga Kesehatan tradisional	Orang	&Tenaga Kesehatan Tradisional (TKT) adalah praktisi kesehatan yang mengandalkan metode dan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, biasanya berakar dalam budaya dan tradisi suatu masyarakat tertentu. Jumlah Tenaga Kesehatan tradisional&	0	0	0	0	0
69	1.02.000240	Tenaga Ketenikisan Medis	Orang	&Tenaga Ketenikisan Medis adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas teknis dan prosedural dalam pelayanan kesehatan. Nakes ini membantu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan diagnosis, perawatan, dan penanganan pasien. Jumlah Tenaga Ketenikisan Medis&	0	0	0	111	173
70	1.02.000241	Tenaga keterampilan fisik	Orang	&Tenaga Keterampilan Fisik adalah profesional kesehatan yang mengkhususkan diri dalam memberikan terapi fisik untuk memulihkan atau meningkatkan fungsi fisik, mobilitas, dan kebugaran pasien yang mengalami cedera, kelainan fisik, atau kondisi medis tertentu. Jumlah Tenaga keterampilan fisik&	0	0	0	62	70
71	1.02.000242	Tenaga Teknik Biomedika	Orang	&Tenaga Teknik Biomedika adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengkalibrasi, menguji, dan memperbaiki peralatan medis dan alat kesehatan yang digunakan dalam berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium medis, dan pusat perawatan kesehatan	0	0	0	98	163

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				lainnya. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa peralatan medis berfungsi dengan baik, akurat, dan aman untuk digunakan dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan pasien. Jumlah Tenaga Teknik Biomedika&					
72	1.02.000244	Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional.	0	0	0	0	0
73	1.02.000245	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	&Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. Usaha Kecil Obat Tradisional yang belum memiliki izin atau habis masa izinnya berarti bahwa usaha tersebut belum mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan atau izin yang dimiliki telah kadaluarsa dan perlu diperbaharui. &	0	0	0	0	0
74	1.02.000246	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin	Sarana	&Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. Usaha Kecil Obat Tradisional yang memiliki izin berarti bahwa usaha tersebut telah mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan setempat untuk memproduksi, mengolah, dan memasarkan produk obat tradisional. &	0	0	0	0	0
75	1.02.000258	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	0	0	0	0	3
76	1.02.000259	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	0	0	0	0	0
77	1.02.000260	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin	Sarana	Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin	0	0	0	0	3
78	1.02.000263	Penderita Diabetes Melitus	Orang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus	0	0	0	14.172	0
79	1.02.000264	Penderita Hipertensi	Orang	Jumlah Penderita Hipertensi	0	0	0	84.543	0
80	1.02.000265	penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Jumlah penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	0	0	1	0
81	1.02.000266	Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Orang	Jumlah Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0	0	0	0	0
82	1.02.000267	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung	293	293	9.066	4.540	15

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan. Jumlah Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB					
83	1.02.000268	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	0	0	0	17.493	0
84	1.02.000269	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	0	0	0	17.493	0
85	1.02.000270	Penduduk Usia Lanjut	Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut	0	155.721	183.149	154.488	169.632
86	1.02.000271	Penduduk Usia Produktif	Orang	Jumlah Penduduk Usia Produktif	0	0	156.457	708.976	1.040.214
87	1.02.000275	Alat Kesehatan	Unit	Alat kesehatan	0	0	0	0	0
88	1.02.000276	Labkesda	Unit	Labkesda adalah unit laboratorium di tingkat daerah atau regional yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jenis uji laboratorium terkait dengan kesehatan masyarakat. Tugas utama Labkesda melibatkan pengujian sampel kesehatan, diagnosis penyakit, dan pemantauan kesehatan lingkungan di wilayah tertentu. Fungsi Labkesda melibatkan pemeriksaan berbagai parameter, seperti tes darah, urin, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya.	0	0	0	0	0
89	1.02.000277	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Lapiran Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	1	1	1	1
90	1.02.000278	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	1	1	1	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							
91	1.02.000282	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	1	1	1	1
92	1.02.000285	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	1	1	1	1
93	1.02.000289	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	1	1	1	1
94	1.02.000290	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	1	1	1	1
95	1.02.000291	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	1	1	1	1
96	1.02.000293	Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	Dokumen	Jumlah Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	0	0	1	1	1
97	1.02.000294	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	1	1	1	1	1
98	1.02.000298	Rumah Sakit yang memenuhi Kriteria sebagai wahana pendidikan	Unit	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi Kriteria sebagai wahana pendidikan	0	0	0	0	0
99	1.02.000299	Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi riteria sebagai wahana pendidikan	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi riteria sebagai wahana pendidikan	0	0	0	0	0
100	1.02.000300	Beasiswa Ikatan Dinas Yang Tersedia	Orang	Jumlah Beasiswa Ikatan Dinas Yang Tersedia	0	0	0	0	0
101	1.02.000301	Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah	Orang	Jumlah Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah	0	0	0	0	0
102	1.02.000302	Tenaga pengajar ilmu kesehatan	Orang	Jumlah tenaga pengajar ilmu kesehatan	0	0	0	0	0
103	1.02.000303	pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan yang tersedia	Unit	Jumlah pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan yang tersedia	0	0	0	0	0
104	1.02.000304	Balai pelatihan kesehatan sesuai standar mutu	Unit	Jumlah balai pelatihan kesehatan sesuai standar mutu	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
105	1.02.000305	Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	0	0	0
106	1.02.000306	Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan	Orang	Jumlah Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan	0	0	0	0	0
107	1.02.000308	Tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya	Orang	Jumlah tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya	0	0	0	0	0
108	1.02.000309	Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai standar	Orang	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai standar	0	0	0	0	0
109	1.02.000310	Dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	0	1	0	0	0
110	1.02.000311	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	0	0	0	13	27
111	1.02.000314	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	1	1	1	1
112	1.02.000315	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Dokumen	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	1	1	1	1	1
113	1.02.000316	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	1	1	1	1	1

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	1.03.000006	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah	Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0	0	0	0	0
2	1.03.000007	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata	Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
3	1.03.000008	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	Bangunan dan Lingkungan	Sistem Perkotaan Nasional meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan strategis nasional.	0	0	0	1	1
4	1.03.000009	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Strategis Lainnya adalah kawasan selain Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	0	0	0	1	1
5	1.03.000012	Bangunan Gedung Cagar Budaya Provinsi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0	0	0	0	0
6	1.03.000014	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0	0	0	0	0
7	1.03.000016	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0	0	0	0	0
8	1.03.000017	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pe	0	0	0	12	0
9	1.03.000020	Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	0	0	0	14	3
10	1.03.000022	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	0	0	0	10	10
11	1.03.000039	Berita acara kesepakatan substansi antara gubernur dengan DPRD Provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda Provinsi	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan substansi antara gubernur dengan DPRD Provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi.	0	0	0	0	1
12	1.03.000041	Berita Acara konsultasi publik I	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik I yang di tandatangi oleh perwakilan peserta yang hadir.	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
13	1.03.000042	Berita Acara konsultasi publik II	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik II yang di tandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.	0	0	0	0	0
14	1.03.000045	Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Provinsi yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.	0	0	0	0	1
15	1.03.000056	Dokumen dan Validasi KLHS Provinsi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Dokumen	Surat Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Provinsi.	0	0	0	0	0
16	1.03.000066	Dokumen Evaluasi Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang disusun	0	0	0	0	0
17	1.03.000069	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan	Dokumen	Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan	3	1	1	1	1
18	1.03.000070	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan	Dokumen	Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatan	3	2	1	2	4
19	1.03.000071	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum	Dokumen	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.	1	1	1	1	1
20	1.03.000073	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Drainase Perkotaan	Dokumen	Jumlah Dokumen kebijakan dan strategi daerah terkait drainase perkotaan yang disusun	0	0	0	0	0
21	1.03.000074	Dokumen kebijakan PERDA/PERGUB selain RTRW Provinsi	Dokumen	Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda/pergub selain RTRW Provinsi.	0	0	0	0	0
22	1.03.000076	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h.	1	1	1	1	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.					
23	1.03.000082	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR/RDTR Provinsi dikhususkan untuk Daerah Khusus Jakarta	0	0	0	0	0
24	1.03.000083	Dokumen Leger Jalan	Dokumen	Leger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalan	0	0	0	0	0
25	1.03.000085	Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapannya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)	0	0	0	0	0
26	1.03.000086	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	0	0	0	0	0
27	1.03.000087	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	0	0	0	0	0
28	1.03.000089	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	0	0	0	0	0
29	1.03.000090	Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0	0	0	0	0
30	1.03.000099	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah	Dokumen	&Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.&	0	0	0	0	0
31	1.03.000100	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata	Dokumen	&Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.&					
32	1.03.000101	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	Dokumen	&Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.&	0	0	0	0	0
33	1.03.000102	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	Dokumen	&Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.&	0	0	0	0	0
34	1.03.000105	Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen	dihapus sesuai PP 21/2021	0	0	0	0	0
35	1.03.000106	Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen	Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan	0	0	0	0	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021). Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Penetapan RTRW Provinsi adalah penetapan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh gubernur (PP 21/2021).					
36	1.03.000107	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi	0	0	0	0	0
37	1.03.000129	Dokumen Pengelolaan Hidrologi WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas air WS Kewenangan Provinsi yang disusun	0	0	0	0	0
38	1.03.000131	Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kualitas air WS Kewenangan Provinsi yang disusun	0	0	0	0	0
39	1.03.000132	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0	0	0	0	0
40	1.03.000133	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0	0	0	0	1
41	1.03.000134	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia					
42	1.03.000135	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air minum disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air minum yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air minum dan jumlah akses air minum yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0	0	0	0	0
43	1.03.000142	Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	- Dokumen pola pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro, dimuat dalam suatu dokumen pola pengelolaan sumber daya air - Dokumen rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang dimuat dalam suatu dokumen rencana pengelolaan sumber daya air	0	0	0	1	0
44	1.03.000144	Dokumen Ranperda (Raperda, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	0	0	0	0	1
45	1.03.000145	Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama).	0	0	0	0	0
46	1.03.000148	Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang disusun	0	0	0	4	0
47	1.03.000150	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.	0	0	0	0	0
48	1.03.000154	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0
49	1.03.000157	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen	RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya					
50	1.03.000158	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0	0	0	0	0
51	1.03.000159	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Provinsi sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0	0	0	0	0
52	1.03.000162	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	1	1	1	1	1
53	1.03.000163	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0	0	0	0	0
54	1.03.000164	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0	0	0	0	0
55	1.03.000165	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	0	0	0	0	0
56	1.03.000166	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0	0	0	0	0
57	1.03.000191	Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Unit	Flood Forecasting and Warning System (FFWS) atau sistem peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kegiatan ini dapat meliputi pembangunan instrumen yang dapat digunakan untuk peramalan debit banjir secara real time sehingga dapat dilakukan peringatan dini untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa. Instrumen FFWS yang dibangun meliputi pembangunan pos hidrologi, pos pemantauan debit air, termasuk pembangunan pusat kendali. Jumlah FFWS yang dibangun	0	0	0	0	0
58	1.03.000192	Flyover	Flyover	Jalan tidak sebidang melayang yang melintasi bagian atas jalan lain untuk menghindari daerah/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yang	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				dilewati jalan rel sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi, mengatasi hambatan karena konflik di persimpangan, dll					
59	1.03.000196	Jembatan	Jembatan	bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antarruas jalan	466	466	467	469	452
60	1.03.000212	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik	0	0	0	29,81	35,7
61	1.03.000223	Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan terkait Penetapan Kawasan Hutan dalam RTRW Provinsi	Dokumen	Surat Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan terkait Penetapan Kawasan Hutan.	0	0	0	0	0
62	1.03.000224	Keterangan Kesesuaian Substansi	Dokumen	Surat keterangan kesesuaian substansi berdasarkan hasil konsultasi dan asistensi substansi terhadap Raperda/Raperkada tentang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota/RDTR Kabupaten/Kota dari Kementerian ATR/BPN yang telah memenuhi kelengkapan dokumen untuk dapat dilanjutkan ke proses Persub. Surat dimaksud ditandatangani oleh Kepala Sub Direktorat pada Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I/II.	0	0	0	0	0
63	1.03.000229	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Provinsi	0	0	0	0	1
64	1.03.000230	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Dokumen	Laporan Hasil Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	0	0	0	0	0
65	1.03.000232	Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	0	0	0	1	0
66	1.03.000233	Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	0	0	0	5	0
67	1.03.000238	Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	Lembaga penyelenggaraan SPALD Kab/Kota dengan tanggung jawab meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada Provinsi Penyelenggaraan SPALD Regional/Kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai lembaga pengatur (regulator). Pemerintah daerah harus membentuk institusi pengelola infrastruktur (operator) sesuai kebutuhan sebagai penanggung jawab operasional,	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				baik UPTD, UPTD-BLUD, dan BUMD dimana operator harus terpisah dari regulator SPALD.					
68	1.03.000246	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	KM	Panjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	0	0	0	1,97	1,27
69	1.03.000247	Panjang Breakwater	KM	Bangunan sejajar pantai yang berfungsi untuk meredam/memecah daya rusak gelombang/ombak sehingga garis pantai dapat terlindungi dari abrasi. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Panjang breakwater yang dibangun	0	0	0	0,43121	0
70	1.03.000249	Panjang Jalan	KM	Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	0	0	0	619,55	0
71	1.03.000251	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	KM	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	0	0	0	2,11235	0
72	1.03.000257	Panjang Sungai	KM	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
73	1.03.000258	Panjang Tanggul	KM	Tanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	1,68924	0
74	1.03.000261	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota	Dokumen	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016).	0	0	0	0	0
75	1.03.000277	Penyempurnaan Ranperda RTRW Provinsi menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi hasil penyempurnaan oleh Pemda Provinsi dengan DPRD Provinsi yang disempurnakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi.	0	0	0	0	0
76	1.03.000282	Persetujuan Bersama dengan DPRD Provinsi atas Ranperda beserta lampirannya (Pasca Linsek)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan persetujuan bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang ditandatangani cap basah, atau tanda tangan elektronik terhadap Raperda RTRW Provinsi.	0	0	0	0	0
77	1.03.000284	Peta (SHP) untuk diunggah dalam bentuk link google drive	Dokumen	Peta digital dalam bentuk format shapefile (shp) yang diunggah dalam bentuk link google drive.	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
78	1.03.000295	Rapat Pelaksanaan Persetujuan Subatansi RTRW Provinsi	Dokumen	Notulensi Rapat Pelaksanaan Persetujuan Subatansi RTRW Provinsi	0	0	0	0	0
79	1.03.000297	Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi	Dokumen	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016).	0	0	0	0	0
80	1.03.000302	Rapat Persiapan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Dokumen	Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Provinsi	0	0	0	0	0
81	1.03.000305	Rekomendasi Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial	Dokumen	Rekomendasi Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial	0	0	0	0	0
82	1.03.000308	Rumah Negara	Rumah Negara		0	0	0	3	0
83	1.03.000315	Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Unit	Jumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang dibangun	0	0	0	6	13
84	1.03.000339	Surat Keterangan Kebenaran/Keaslian Dokumen dari Dinas Tata Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	Surat Keterangan Kebenaran/Keaslian Dokumen dari Dinas Tata Ruang Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
85	1.03.000343	Surat penyampaian Ranperda RTRW Provinsi yang telah disempurnakan dari Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri	Dokumen	Surat penyampaian Ranperda RTRW Provinsi yang telah disempurnakan di tanda tangani oleh Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri	0	0	0	0	0
86	1.03.000346	Surat Permohonan Evaluasi dari Gubernur	Dokumen	Surat Permohonan Evaluasi Raperda RTRW Provinsi ditandatangani oleh Gubernur yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri	0	0	0	0	0
87	1.03.000348	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan	Dokumen	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan	0	0	0	0	0
88	1.03.000349	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW Provinsi	Dokumen	Surat Persetujuan substansi di tanda tangani Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW Provinsi	0	0	0	0	0
89	1.03.000353	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh gubernur	Dokumen	Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang di tandatangani oleh Gubernur	0	0	0	0	0
90	1.03.000357	Terowongan/Tunnel	Terowongan/Tunnel	Bangunan jalan yang melintas di bawah permukaan tanah dengan persyaratan teknis sebagai berikut: a. Memiliki ruang yang memadai untuk dapat menampung semua fasilitas terowongan b. Dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan					
91	1.03.000364	Underpass	Underpass	jalan tidak sebidang lebih rendah yang melintasi bagian bawah jalan lain untuk menghindari daerah/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yang dilewati jalan rel sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi, mengatasi hambatan karena konflik dipersimpangan, dll	0	0	0	0	0
92	1.03.000384	Jumlah Arsitek yang terdaftar	Orang	Jumlah Arsitek terdaftar adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan Praktik Arsitek.	0	0	0	25	0
93	1.03.000385	Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi ahli.	0	0	0	10	0
94	1.03.000389	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha	Badan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang sedang bekerja pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD Provinsi dan/atau bekerja pada kegiatan konstruksi Lintas Kabupaten/Kota yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha.	0	0	0	129	0
95	1.03.000390	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata	Kawasan	1. Penataan pada Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan (Prioritas utama pada suboutput ini adalah cagar budaya nasional yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (sk mendikbud)) 2. Item yang disentuh dalam hal ini adalah Kawasan pendukung pada bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya	0	0	0	0	0
96	1.03.000391	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan agar mengikuti kaidah penataan/rehabilitasi bangunan gedung atau kawasan cagar budaya	0	0	0	0	0
97	1.03.000392	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur bangunan Gedung dan penataan bangunan sesuai indikasi program yang telah tercantum dalam lampiran pp 50 tahun 2011	0	0	0	0	0
98	1.03.000393	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0	0	0	0	0
99	1.03.000394	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan perkotaan dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp) sesuai permendagri nomor 57 tahun 2010 pada	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				bidang penataan bangunan dan lingkungan					
100	1.03.000395	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0	0	0	0	0
101	1.03.000396	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp)	0	0	0	0	0
102	1.03.000397	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0	0	0	0	0
103	1.03.000401	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Kajian identifikasi meliputi: a. b. identifikasi nilai penting dan arti khusus c. pendataan dan penilaian kondisi fisik dan d. studi kelayakan Pelestarian BGCB. &	0	0	0	0	0
104	1.03.000402	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCG) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Penyelenggaraan BGCB Yang Dilestarikan adalah kegiatan persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, serta pemanfaatan.&	0	0	0	0	0
105	1.03.000403	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCG) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap banguna gedung yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.&	0	0	0	0	0
106	1.03.000404	Jumlah Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pemerintah	0	0	0	14	22
107	1.03.000405	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang sudah terdaftar dengan dibuktikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) sebagai pencatatan/inventarisasi Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan untuk tertib administrasi	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
108	1.03.000406	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung	0	0	0	0	0
109	1.03.000407	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat	Bangunan Gedung	Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.	0	0	0	1	0
110	1.03.000409	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat	Bangunan Gedung	Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.	0	0	0	16	17
111	1.03.000412	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Bangunan Gedung	Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.	0	0	0	0	0
112	1.03.000413	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teknis Bangunan Gedung.	0	0	0	0	0
113	1.03.000416	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Paket	Bangunan Konstruksi merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang dibiayai dengan dana APBD Provinsi dan/atau produk konstruksi Lintas Kabupaten/Kota yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha.	0	0	0	0	0
114	1.03.000420	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	Data dan informasi jasa konstruksi cakupan provinsi sesuai Indikator Kinerja Kunci sesuai peraturan perundang-undangan	0	0	0	1	0
115	1.03.000422	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi paling sedikit mencakup nama pekerjaan konstruksi, lokasi, jenis, waktu, dampak dan penyebab kecelakaan.	0	0	0	0	0
116	1.03.000426	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPDBU	Dokumen	Skema KPDBU mencakup Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.	0	0	0	0	0
117	1.03.000427	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Dokumen	1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK.	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
118	1.03.000431	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi mencakup Tahun Anggaran, Nama Pekerjaan, Sumber Dana, Pengguna jasa, Penyedia jasa, Nilai kontrak, Jenis kontrak, Karakteristik kontrak, Persentase Progres fisik, Waktu Progres fisik, Persentase Progres keuangan, Waktu Progres keuangan.	0	0	0	0	0
119	1.03.000432	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi paling sedikit mencakup nama, NIK, jabatan kerja, klasifikasi subklasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli.	0	0	0	1	0
120	1.03.000434	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama bangunan konstruksi, penanggung jawab/pengelola, lokasi, hasil pengawasan tertib pemanfaatan produk.	0	0	0	0	0
121	1.03.000435	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa konsultansi konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	0	0	0	0	0
122	1.03.000436	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	0	0	0	1	0
123	1.03.000437	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	0	0	0	0	0
124	1.03.000438	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi, sertifikat badan usaha, hasil pengawasan tertib usaha.	0	0	0	0	0
125	1.03.000440	Jumlah Dokumen Jakstrada Persampahan Provinsi	Dokumen	Diubah menjadi & Jakstrada Persampahan Provinsi adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi yang terpadu dan berkelanjutan&	0	0	0	0	0
126	1.03.000442	Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional	Dokumen	Dokumen Studi kelayakan merupakan kajian kelayakan teknis, keuangan, dan ekonomi serta analisis risiko lingkungan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh komponen SPALD, dengan cakupan layanan penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa	0	0	0	0	0
127	1.03.000443	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen	Kajian/studi kelayakan diperlukan untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologis, termal atau	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 ton/hari yang disusun berdasarkan: a. rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah b. kelayakan teknis, ekonomi, dan dan c. kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 3/2013&					
128	1.03.000445	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing)	0	0	0	0	0
129	1.03.000446	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air limbah serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/ kota	0	0	0	0	0
130	1.03.000450	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Gedung adalah dokumen operasionalisasi, pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedung	0	0	0	0	0
131	1.03.000451	Jumlah Dokumen Pembinaan	Dokumen	-Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konsultasi dan fasilitasi dalam pembangunan bangunan gedung negara	0	0	0	1	0
132	1.03.000453	Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Pembokaran Pembangunan Gedung adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya diantaranya adalah dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) dan dokumen pelaksanaan pembongkaran	0	0	0	0	0
133	1.03.000454	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dokumen	&Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&	0	0	0	0	0
134	1.03.000456	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Pegawasan Pembangunan Gedung adalah terkait Laporan pengawasan dari konsultan MK/ supervisi yang dilaporkan setiap bulan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
135	1.03.000457	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&	0	0	0	0	0
136	1.03.000458	Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0	0	0	0	0
137	1.03.000459	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0	0	0	0	0
138	1.03.000461	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapannya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Perencanaan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan penyusunan rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis yang ditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
139	1.03.000465	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Dokumen	Dokumen Produk hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi merupakan Peraturan yang disusun daerah meliputi kebijakan khusus, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di daerah.	0	0	0	0	0
140	1.03.000467	Jumlah Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi yang disusun	0	0	0	0	0
141	1.03.000469	Jumlah Dokumen Prosedur Operasi Standar Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dokumen Prosedur Operasi Standar SPAM merupakan dokumen yang memuat prosedur pengeoperasian unit SPAM, meliputi prosedur operasi dan pemeliharaan	0	0	0	0	0
142	1.03.000470	Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Readiness Criteria dapat berupa DED, RAB, Kesiapan Lahan, dan Lembaga Pengelola	0	0	0	0	0
143	1.03.000471	Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Readiness Criteria dapat berupa DED, RAB, Kesiapan Lahan, dan Lembaga Pengelola	0	0	0	0	0
144	1.03.000474	Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota adalah dokumen yang memuat kelengkapan kesiapan pelaksanaan kontruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota Readiness criteria pelaksanaan konstruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota diantaranya terdiri dari: RISPAM Provinsi, Studi kelayakan/ justifikasi teknis, DED, KAK dan RAB, Kesiapan lahan, Izin penggunaan Air Baku, Kesiapan lembaga pengelola, Kesiapan DDUB, Kesiapan serah terima aset, Surat pernyataan Gubernur	0	0	0	0	0
145	1.03.000475	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0
146	1.03.000476	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan adalah salah satu perencanaan umum penyelenggaraan PSP yang memuat rencana: a. daerah b. kebutuhan dan tingkat c. penyelenggaraan PSP yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan dan peran serta dan d. tahapan pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 3/2013	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
147	1.03.000477	Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0	0	0	0	0
148	1.03.000478	Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Dokumen	Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) didefinisikan sebagai upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (prevention) sumber air dan pencegahan (protection) pencemaran badan air mulai maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (catchment) sampai ke keran air (water-tap) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk mencapai standar kualitas air yang diterima oleh semua pihak	0	0	0	0	0
149	1.03.000479	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	Dokumen yang berisi tentang kapasitas air baku yang dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum	0	0	0	0	0
150	1.03.000481	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.	0	0	0	0	0
151	1.03.000483	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen rencana teknis rinci (RTR/DED) SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD	0	0	0	0	0
152	1.03.000485	Jumlah dokumen roadmap sanitasi Provinsi	Dokumen	Dokumen roadmap sanitasi Provinsi adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan penyediaan sanitasi.	0	0	0	0	0
153	1.03.000487	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan.	0	0	0	1	0
154	1.03.000489	Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Dokumen	Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang difasilitasi penyusunannya oleh Provinsi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota yang disusun oleh Pemda Kab/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi	0	0	0	0	0
155	1.03.000491	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dokumen studi kelayakan merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				pelayanan ditinjau dari aspek teknis, teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.					
156	1.03.000493	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Dokumen Training Need Assessment (TNA) Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan Ahli paling sedikit meliputi standar operasional (SOP) pelatihan, jenis pelatihan, perhitungan jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan ahli yang perlu dilatih, jumlah instruktur, biaya yang diperlukan, sumber pendanaan, identifikasi kerja sama, dan sarana prasarana pelatihan.	0	0	0	1	0
157	1.03.000496	Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.	0	0	0	15	0
158	1.03.000502	Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik	Dokumen	Dokumen Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengatur pengelolaan air limbah domestik	0	0	0	0	0
159	1.03.000503	Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan	Dokumen	Dokumen kajian naskah akademis penyusunan regulasi persampahan merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengatur pengelolaan persampahan	0	0	0	0	0
160	1.03.000505	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	Dokumen meliputi Data Umum SPAM Lintas Kabupaten/Kota (jumlah unit SPAM Lintas Kabupaten/Kota, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM Lintas Kabupaten/Kota (status keberfungsian SPAM, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)	0	0	0	0	0
161	1.03.000506	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan	Layanan Informasi Jasa Konstruksi adalah dokumen yang berisi data dan informasi yang dihasilkan dalam pengelolaan SIPJAKI sebagaimana indikator kinerja kunci sesuai peraturan perundang-undangan	0	0	0	1	1
162	1.03.000507	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Lembaga	Lembaga Jasa Konstruksi meliputi masyarakat Jasa Konstruksi seperti OPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Instansi terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi, Pemilik/Pengelola Bangunan	0	0	0	150	1
163	1.03.000508	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA	Lembaga	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang disusun	0	0	0	0	0
164	1.03.000509	Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM 1. Lembaga Pengelola SPAM dengan hasil penilaian kinerja yang meningkat dari hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 2. Lembaga pengelola yang menetapkan tarif FCR dan termuat dalam hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 3. Lembaga Pengelola SPAM dalam bentuk BUMD yang sudah memiliki SK	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				pembentukan, SK tarif, SK organisasi. Kalau bentuk UPTD, yang sudah memiliki Perda Pembentukan Dinas, Perkada Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD, SK Pejabat, SK Kepala Dinas tentang Tupoksi dan Penunjukkan SDM, Perda Retribusi Jasa Pelayanan Air 4. Lembaga Pengelola SPAM yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD atau BUMD itu dapat berupa Subsidi Bunga, B to B atau lainnya 5. Lembaga Pengelola SPAM yang telah melakukan pembinaan kepada pelanggan/calon pelanggan berupa anjuran untuk melakukan penyambungan SR dan pembayaran tepat waktu. 6. Lembaga pengelola SPAM yang telah membuat dokumen RPAM					
165	1.03.000511	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Persampahan	Lembaga	Lembaga sistem pengelolaan persampahan adalah penyelenggara pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah/pokja/pengelola pihak ketiga yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan persampahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	0	0	0	0	0
166	1.03.000515	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Orang	Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.	0	0	0	50	0
167	1.03.000518	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Paket	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD Provinsi dan/atau kegiatan konstruksi Lintas Kabupaten/Kota yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha.	0	0	0	0	0
168	1.03.000527	Jumlah Pengelola SIPJAKI	Orang	Pengelola SIPJAKI adalah seseorang atau tim yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menginput data dan informasi dalam SIPJAKI.	0	0	0	24	0
169	1.03.000529	Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Penyelenggara Pelatihan adalah seseorang atau tim yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelatihan.	0	0	0	30	0
170	1.03.000531	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Unit	Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi paling sedikit meliputi jaringan listrik, penyediaan server, komputer dan penyediaan jaringan internet.	0	0	0	1	0
171	1.03.000532	Jumlah Prasarana dan Saran Pendukung SPALD Terpusat	Paket	Sub-sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas: a. pipa retikulasi b. pipa induk lubang kontrol (manhole) c. bangunan penggelontor d. terminal pembersihan (clean out) e. pipa perlintasan (siphon) dan/atau f. stasiun pompa	0	0	0	0	0
172	1.03.000533	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung	Paket	Sub-sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat		air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas: a. pipa retikulasi b. pipa induk lubang kontrol (manhole) c. bangunan penggelontor d. terminal pembersihan (clean out) e. pipa perlintasan (siphon) dan/atau f. stasiun pompa					
173	1.03.000535	Jumlah prasarana dan sarana pendukung IPALD Terpusat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa	0	0	0	0	0
174	1.03.000538	Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Rencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.	0	0	0	0	0
175	1.03.000539	Jumlah Rumah Negara	Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang sudah terdaftar dengan dibuktikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) sebagai pencatatan/inventarisasi rumah negara yang dilaksanakan untuk tertib administrasi	0	0	0	0	0
176	1.03.000540	Jumlah Rumah Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang sudah terdaftar dengan dibuktikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) sebagai pencatatan/inventarisasi rumah negara yang dilaksanakan untuk tertib administrasi	0	0	0	0	0
177	1.03.000542	Jumlah Sambungan Rumah	Sambungan Rumah (SR)	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal (HU dan KU)	0	0	0	3.355	0
178	1.03.000543	Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan	Unit	Sarana pemilahan persampahan adalah peralatan untuk kegiatan memilah sampah yang disediakan berdasarkan volume sampah, jenis sampah yang dibedakan/dipilah paling tidak dalam 2 jenis, penempatan, jadwal pengumpulan, dan jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan&	0	0	0	0	0
179	1.03.000544	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.	0	0	0	0	0
180	1.03.000554	Jumlah Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya yang ditingkatkan	KM	Panjang seawall yang ditingkatkan	0	0	0	2,61628	0
181	1.03.000555	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan		0	0	0	6	22

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
182	1.03.000559	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0	0	0	0	0
183	1.03.000560	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0	0	0	35	17
184	1.03.000561	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0	0	0	35	16
185	1.03.000568	Jumlah SPAM	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0	0	0	35	17
186	1.03.000569	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi ahli yang mencakup jenjang 7, 8, dan 9 di wilayah kewenangannya	0	0	0	89	11
187	1.03.000575	Jumlah TPST	Unit	TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir	0	0	0	0	0
188	1.03.000578	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)	MÂ³/Hari	Kapasitas IPALD adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	0	0	0	0	0
189	1.03.000579	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	MÂ³/Hari	Kapasitas IPALD Terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	0	0	0	0	0
190	1.03.000585	Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Kapasitas SPA adalah kemampuan infrastruktur SPA untuk menampung dan mengelola sampah dengan satuan ton per hari	0	0	0	0	0
191	1.03.000587	Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Kapasitas TPA adalah kemampuan infrastruktur TPA memproses pengolahan sampah dengan satuan ton per hari Fasilitas penunjang TPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPA Kapasitas TPST adalah kemampuan infrastruktur TPST untuk memproses pengolahan sampah dengan satuan ton per hari Kapasitas TPS 3R adalah kemampuan infrastruktur TPS3R untuk menampung Kapasitas TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS untuk menampung sampah dengan satuan ton per hari	0	0	0	0	0
192	1.03.000589	Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Kapasitas TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS untuk memproses pengolahan sampah dengan satuan ton per hari	0	0	0	0	0
193	1.03.000591	Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Kapasitas TPS 3R adalah kemampuan infrastruktur TPS3R untuk menampung	0	0	0	0	0
194	1.03.000593	Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Kapasitas TPST adalah kemampuan infrastruktur TPST untuk memproses pengolahan sampah dengan satuan ton per hari	0	0	0	0	0
195	1.03.000595	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik					
196	1.03.000596	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	0	0	0	29,81	35,7
197	1.03.000597	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	0	0	0	29,81	35,7
198	1.03.000598	Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik	0	0	0	0	0
199	1.03.000599	Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	0	0	0	29,81	35,7
200	1.03.000602	Panjang Bangunan Pengaman Pantai	KM	Panjang bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun, selain breakwater dan seawall. Dapat berupa jetty, groin/krib, atau revetment dari susunan batu	0	0	0	0	3111
201	1.03.000604	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi	KM	Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Provinsi yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permrukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	1080,3	1080,3	1080,3	1080,3	996,63
202	1.03.000610	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia					
203	1.03.000612	Kapasitas IPLT	MÂ³/Hari	Kapasitas IPLT adalah kemampuan pengolahan lumpur tinja pada IPLT tiap harinya dalam satuan MÂ³	0	0	0	0	0
204	1.03.000614	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan	0	0	0	0	0
205	1.03.000615	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	Lembaga penyelenggaraan SPALD Regional dengan tanggung jawab meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada Provinsi Penyelenggaraan SPALD Regional/Kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai lembaga pengatur (regulator). Pemerintah daerah harus membentuk institusi pengelola infrastruktur (operator) sesuai kebutuhan sebagai penanggung jawab operasional, baik UPTD, UPTD-BLUD, dan BUMD dimana operator harus terpisah dari regulator SPALD.	0	0	0	0	0
206	1.03.000616	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan	0	0	0	0	0
207	1.03.000617	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Paket	Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT. Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari: 1) platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul); 2) kantor yang diperuntukkan bagi tenaga 3) gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan 4) laboratorium untuk pemantauan kinerja 5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan 6) sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar 7) fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian 8) alat 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Kerja (K3); 10) pos 11) pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan 12) pipa 13) tanaman dan/atau 14) sumber energi listrik.					
208	1.03.000623	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	Dokumen meliputi jumlah air baku (mata air, air tanah, air permukaan) kapasitas air baku (l/det), kapasitas yang sudah digunakan (l/det), kapasitas masih dapat dimanfaatkan (l/det)	0	0	0	0	1
209	1.03.000624	Jumlah Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah	Sambungan Rumah (SR)	Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal (HU dan KU) Konversi sambungan rumah adalah 1SR= 4 jiwa	0	0	0	3.355	0
210	1.03.000628	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya	Lembaga	Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang mendapatkan peningkatan kinerja melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0	0	0
211	1.03.000629	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan	0	0	0	0	0
212	1.03.000635	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pendataan seluruh lembaga/pelaksana penyelenggara SPALD di wilayahnya	kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pendataan seluruh lembaga/pelaksana penyelenggara SPALD di wilayahnya melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0	0	0
213	1.03.000636	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit SPALD	SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.	0	0	0	0	0
214	1.03.000637	Pembangunan Bendungan	Bendungan	Merupakan pekerjaan konstruksi bangunan konservasi yang berupa urugan tanah, urugan batu, atau beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Pembangunan bendungan meliputi tubuh bendungan, saluran dan bangunan pengelak (terowongan atau konduit), bangunan pelimpah (spillway), dan bangunan pelengkap lainnya seperti bangunan pengambilan dan peralatan hidromekanikal. Jumlah bendungan yang dibangun Kriteria bendungan: 1. bendungan dengan tinggi 15 meter atau lebih diukur dari pondasi terdalam 2. bendungan dengan tinggi 10-15 meter diukur dari pondasi terdalam dengan ketentuan: a. panjang puncak bendungan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				paling sedikit 500 meter b. daya tampung waduk paling sedikit 500.000 meter atau c. debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 m3/detik 3. bendungan yang mempunyai kesulitan khusus pada pondasi atau yang didesain dengan menggunakan teknologi baru dan/atau yang memiliki kelas bahaya tinggi					
215	1.03.000638	Rehabilitasi Bendungan	Unit	Jumlah bendungan yang direhabilitasi, dapat berupa perbaikan sebagian ataupun menyeluruh satu kesatuan bangunan bendungan Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi bendungan untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Bagian yang direhabilitasi dapat hanya berupa perbaikan sebagian (tubuh bendungan saja atau bangunan pelengkap saja) ataupun perbaikan menyeluruh (tubuh bendungan beserta bangunan pelengkap). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi/perbaikan	0	0	0	0	0
216	1.03.000639	Jumlah Pembangunan Embung	Unit	Jumlah embung yang dibangun. Embung dimaksud dapat berupa tampungan air buatan yang digali atau diurug (timbunan tanah atau batu)	0	0	0	0	0
217	1.03.000641	Jumlah Pembangunan Penampung Air	Unit	Jumlah bangunan penampung air yang dibangun (buatan) selain embung	0	0	0	0	0
218	1.03.000642	Panjang Pembangunan Kanal Banjir	Km	Panjang kanal banjir yang dibangun. Konstruksinya dapat berupa saluran terbuka, seperti saluran tanah terbuka, atau saluran yang diperkuat (di-lining) dengan beton atau pasangan batu. Dapat juga berupa saluran tertutup (terowongan atau conduit).	0	0	0	0	0
219	1.03.000643	Jumlah Rehabilitasi embung	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi embung dan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi/perbaikan Jumlah embung yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
220	1.03.000644	Jumlah Rehabilitasi Penampung Air Lainnya	Unit	Jumlah bangunan penampung air (buatan) yang direhabilitasi selain embung dan tampungan alami (danau/situ)	0	0	0	0	0
221	1.03.000645	Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Pembangunan prasarana air baku berupa sumur bor pada daerah cekungan air tanah (CAT). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah titik/lokasi sumur air tanah yang dibangun	0	0	0	15	0
222	1.03.000646	Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi sumur bor untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Rehabilitasi dapat berupa pencucian sumur, penggantian pompa, perbaikan struktur dan komponen lainnya. Termasuk juga peningkatan kapasitas air baku Jumlah titik/lokasi sumur air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	14	0
223	1.03.000647	Jumlah Pembangunan Unit Air Baku	Unit	Pembangunan prasarana air baku yang secara umum terdiri dari intake/pengambilan, penampungan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				(kolam/reservoir), dan saluran/sarana pembawa ke unit pengolahan (jaringan transmisi). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah unit air baku yang dibangun, dapat berupa intake bebas, bendung air baku, broncaptering, reservoir, ABSAH, beserta jaringan transmisi					
224	1.03.000648	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi unit air baku beserta jaringannya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Rehabilitasi dapat berupa perbaikan intake, perbaikan bendung, perbaikan pompa, serta perbaikan bangunan pendukung dan jaringan transmisi Jumlah unit air baku yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
225	1.03.000649	Panjang Pembangunan Tanggul Sungai	Km	Merupakan infrastruktur pelindung yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran air atau untuk mencegah banjir. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Panjang tanggul sungai yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	0	0	0	1,26638	3900
226	1.03.000650	Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai	Km	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi tanggul sungai untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
227	1.03.000651	Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
228	1.03.000652	Jumlah Pembangunan Pintu Air	Unit	Bendung pengendali banjir merupakan infrastruktur pengendalian banjir yang dilengkapi dengan pintu yang dapat diatur untuk mengatur elevasi muka air. Bendung pengendali banjir juga dapat berupa bendung karet yang dapat diatur untuk kembang/kempis sesuai elevasi muka air yang diinginkan. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah pintu air yang dibangun, termasuk bendung gerak dengan pintu	0	0	0	0	23
229	1.03.000653	Jumlah Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir	Unit	Jumlah bendung pengendali banjir, termasuk bendung gerak dengan pintu, bendung karet	0	0	0	0	0
230	1.03.000654	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Unit	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
231	1.03.000655	Panjang Rehabilitasi Kanal Banjir	Km	Panjang kanal banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
232	1.03.000656	Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Unit	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
233	1.03.000657	Jumlah Pembangunan Polder	Unit	Jumlah sistem polder yang dibangun	0	0	0	0	0
234	1.03.000658	Jumlah Pembangunan Kolam Retensi	Unit	Jumlah kolam retensi yang dibangun	0	0	0	0	0
235	1.03.000659	Jumlah Rehabilitasi Polder	Unit	Jumlah polder yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
236	1.03.000660	Jumlah Rehabilitasi Kolam Retensi	Unit	Jumlah kolam retensi yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
237	1.03.000661	Jumlah Pembangunan Bangunan Sabo	Unit	Jumlah sabo dam yang dibangun	0	0	0	0	0
238	1.03.000662	Jumlah Rehabilitasi Check dam	Unit	Jumlah check dam yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
239	1.03.000663	Jumlah Pembangunan Check Dam	Unit	Jumlah check dam yang dibangun	0	0	0	0	0
240	1.03.000664	Panjang Pebangunan Seawall	Km	Panjang seawall yang dibangun	0	0	0	0	0
241	1.03.000665	Panjang Rehabilitasi Seawall	Km	Panjang seawall yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
242	1.03.000666	Panjang Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Km	Panjang bangunan pengaman pantai lainnya yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
243	1.03.000667	Panjang Peningkatan Tanggul Sungai	Km	Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	0	0	0	0	0
244	1.03.000668	Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang bangunan perkuatan tebing sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	0	0	0	0	0
245	1.03.000669	Jumlah Peningkatan Pintu Air	Unit	Jumlah pintu air yang ditingkatkan/direhabilitasi	0	0	0	22	0
246	1.03.000670	Jumlah Peningkatan Bendung Pengendali Banjir	Unit	Jumlah bendung pengendali banjir yang ditingkatkan	0	0	0	0	0
247	1.03.000671	panjang Peningkatan Kanal Banjir	Km	&Pekerjaan peningkatan kanal banjir dapat berupa: 1. peningkatan jenis konstruksi, seperti tanggul tanah menjadi tanggul beton 2. penambahan panjang kanal karena area yang akan dilindungi bertambah& Panjang kanal banjir yang ditingkatkan	0	0	0	0	0
248	1.03.000672	Jumlah Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Unit	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	0	0	0
249	1.03.000673	Jumlah Peningkatan Polder	Unit	jumlah polder yang ditingkatkan	0	0	0	0	0
250	1.03.000674	Jumlah Peningkatan Kolam Retensi	Unit	Jumlah kolam retensi yang ditingkatkan	0	0	0	0	0
251	1.03.000675	Jumlah Peningkatan Bangunan Sabo	Unit	Jumlah sabo dam yang ditingkatkan	0	0	0	0	0
252	1.03.000676	Jumlah Peningkatan Check DAM	Unit	Jumlah check dam yang ditingkatkan	0	0	0	0	0
253	1.03.000677	Peningkatan Panjang Breakwater	Km	Panjang breakwater yang ditingkatkan	0	0	0	0	0
254	1.03.000678	Panjang Peningkatan Bangunan Pengaman Pantai	Km	Panjang bangunan pengaman pantai yang ditingkatkan	0	0	0	0	0
255	1.03.000679	Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Unit	Jumlah unit FFWS yang ditingkatkan	0	0	0	0	0
256	1.03.000680	Jumlah Revitalisasi Danau	Danau	Jumlah danau yang direvitalisasi	0	0	0	0	0
257	1.03.000681	Jumlah Revitalisasi Situ	SITU	Jumlah situ yang direvitalisasi	0	0	0	0	0
258	1.03.000682	Jumlah Revitalisasi Penampung Air Alami	Penampung Air Alami	Jumlah tampungan air lainnya yang direvitalisasi	0	0	0	0	0
259	1.03.000683	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	Km	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	0	0	0	0	0
260	1.03.000684	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Unit	Jumlah infrastruktur untuk melindungi mata air yang dibangun	0	0	0	0	0
261	1.03.000685	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Bendungan	Jumlah bendungan yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
262	1.03.000686	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Unit	Jumlah embung yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
263	1.03.000688	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Unit	Cekungan/tampungan air yang terbentuk secara alami. Revitalisasi danau bertujuan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan sedimen, pembersihan gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai					
264	1.03.000689	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya	Unit	Bangunan penampung air lainnya dapat meliputi long storage dan dam parit	0	0	0	0	0
265	1.03.000691	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
266	1.03.000692	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Unit	Jumlah embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
267	1.03.000693	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul	Km	Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
268	1.03.000694	Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai	Km	Panjang tebing sungai yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
269	1.03.000695	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Km	Panjang kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
270	1.03.000696	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Unit	Jumlah stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
271	1.03.000697	Operasi dan Pemeliharaan Polder	Unit	Jumlah polder yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
272	1.03.000698	Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi	Unit	&Jumlah kolam retensi yang dioperasi dan dipelihara. Kolam Retensi adalah kolam/waduk penampungan air hujan dalam jangka waktu tertentu. Fungsinya untuk memotong puncak banjir yang terjadi dalam badan air/sungai.&	0	0	0	0	0
273	1.03.000699	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Unit	Jumlah bangunan sabo yang dipelihara	0	0	0	0	0
274	1.03.000700	Operasi dan Pemeliharaan Check DAM	Unit	Jumlah check dam yang dipelihara	0	0	0	0	0
275	1.03.000701	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Breakwater	Km	Panjang breakwater yang dipelihara	0	0	0	0	0
276	1.03.000702	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Seawall	Km	Panjang seawall yang dipelihara	0	0	0	0	0
277	1.03.000703	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Bangunan Pengaman Pantai	Km	Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun	0	0	0	0	0
278	1.03.000704	Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang dibangun	0	0	0	0	0
279	1.03.000705	Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Panjang jaringan irigasi rawa yang dibangun	0	0	0	0	0
280	1.03.000706	Pembangunan Panjang Irigasi Tambak	Km	Panjang jaringan irigasi tambak yang dibangun	0	0	0	0	0
281	1.03.000707	Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun	0	0	0	0	0
282	1.03.000708	Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Panjang jaringan irigasi air tanah yang dibangun	0	0	0	0	0
283	1.03.000709	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	0	0	0	2,11235	0
284	1.03.000710	Peningkatan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah Bendung Irigasi yang ditingkatkan	0	0	0	0	0
285	1.03.000711	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang ditingkatkan	0	0	0	0	0
286	1.03.000712	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang ditingkatkan	0	0	0	0	0
287	1.03.000713	Peningkatan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
288	1.03.000714	Peningkatan Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan	0	0	0	0	0
289	1.03.000715	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	1,220	0
290	1.03.000716	Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
291	1.03.000717	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
292	1.03.000718	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	Panjang jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
293	1.03.000719	Rehabilitasi Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
294	1.03.000720	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Panjang jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0
295	1.03.000721	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
296	1.03.000722	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
297	1.03.000723	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
298	1.03.000724	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	Panjang jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
299	1.03.000725	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Titik	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
300	1.03.000726	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Panjang jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
301	1.03.000727	Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi	Lembaga	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang difasilitasi	0	0	0	0	1
302	1.03.000728	Jumlah Alokasi Air di Daerah Irigasi	Liter/Detik	Jumlah alokasi air di Daerah irigasi yang diberikan	0	0	0	0	0
303	1.03.000729	Fasilitasi Jumlah Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	0	0	0	1	1
304	1.03.000730	Fasilitasi Jumlah Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	0	0	0	5	30
305	1.03.000731	Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi drainase yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0	0	0	0	0
306	1.03.000732	Penyusunan Jumlah Dokumen Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengawasan konstruksi Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0	0	0	0	0
307	1.03.000733	Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang dibangun	0	14,5	0	758,35	1,55
308	1.03.000734	Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang dtingkatkan	0	0	0	0	0
309	1.03.000735	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
310	1.03.000736	Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air Baku	mÂ³/detik	Jumlah kapasitas unit air baku yang bertambah akibat pembangunan baru	0	0	0	0	0
311	1.03.000737	Jumlah Pembangunan Bendung Pengendali Banjir	Unit	Jumlah bendung pengendali banjir, termasuk bendung gerak dengan pintu, bendung karet	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
312	1.03.000738	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Situ	SITU	Jumlah Situ yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
313	1.03.000740	Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi	0	0	0	0	0
314	1.03.000741	Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	0	0	0	0	0
315	1.03.000742	Jumlah kawasan rawa	Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang akan dikoordinasikan, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa	0	0	0	0	0
316	1.03.000744	Pengamanan Mata Air	Titik	Jumlah mata air yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
317	1.03.000745	Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dokumen studi kelayakan merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.	0	0	0	0	0
318	1.03.000746	Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) SPAM merupakan dokumen rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.	0	0	0	0	0
319	1.03.000747	Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP) SPAM merupakan dokumen yang memuat prosedur pengeoperasian unit SPAM, meliputi prosedur operasi dan pemeliharaan	0	0	0	0	0
320	1.03.000748	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	Dokumen meliputi Data Umum SPAM (jumlah unit SPAM, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM (status keberfungsian spam, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)	0	0	0	0	0
321	1.03.000749	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik	0	0	0	29,81	35,7
322	1.03.000750	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Unit SPAM	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0	0	0	30	17
323	1.03.0910102	Jumlah dokumen pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya	Dokumen	&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer)	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				dan serah terima akhir final hand over)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrik, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&					
324	1.03.910102	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata	Dokumen	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata	0	0	0	0	0
325	1.03.910103	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Sistem Perkotaan Nasional	Dokumen	&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional meliputi : a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand over) dan serah terima akhir final hand over)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrik, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&	0	0	0	0	0
326	1.03.910104	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis Lainnya	Dokumen	&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand over)	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				dan serah terima akhir final hand over)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrik, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&					
327	1.03.910105	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0	0	0	0	0
328	1.03.910106	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Unit	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.	0	0	0	0	0
329	1.03.910107	Jumlah Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.	0	0	0	0	0
330	1.03.910108	Jumlah Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Sistem Perkotaan Nasional meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan strategis nasional.	0	0	0	0	0
331	1.03.910109	Jumlah Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Strategis Lainnya adalah kawasan selain Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	0	0	0	0	0
332	1.03.910114	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Orang	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.	0	0	0	0	0
333	1.03.910117	Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum	Sambungan Rumah (SR)	Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal Hidran Umum dan Keran Umum.	0	0	0	3.355	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
334	1.03.910118	Jumlah perjanjian kerja sama SPAM lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Perjajian kerja sama SPAM lintas Kabupaten/Kota yang penyusunannya difasilitasi Pemerintah Provinsi	0	0	0	0	0
335	1.03.910119	Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan dan pengelolaan dan pengembangan SPAM	kabupaten/kota	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengelolaan dan pengembangan SPAM dari pemerintah provinsi	0	0	0	0	0
336	1.03.910121	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan SPALD	Jiwa	Warga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima layanan SPALD-T	0	0	0	0	0
337	1.03.910123	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD	Orang	Masyarakat yang telah mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD adalah individu yang telah mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0	0	0
338	1.03.910124	Jumlah perjanjian kerja sama SPALD lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Perjajian kerja sama SPALD lintas Kabupaten/Kota yang penyusunannya oleh Pemerintah Provinsi dan/atau penyusunannya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi	0	0	0	0	0
339	1.03.910125	Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan pembinaan SPALD	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Yang telah mendapatkan pembinaan pengembangan SPALD	0	0	0	0	0
340	1.03.910126	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa	0	0	0	0	0
341	1.03.910128	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa& Jaringan perpipaan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan dan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat Sambungan rumah adalah sambungan pelanggan yang mensuplai langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi melalui water meter dan instalasi pipanya didalam rumah	0	0	0	0	0
342	1.03.910129	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen RTBL mengacu pada	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah.					
343	1.03.910130	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan	Laporan yang disesuaikan dengan kewenangannya, yaitu: a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan b. meminta c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang d. memasuki tempat atau lokasi e. f. membuat rekaman audio g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana h. menghentikan pelanggaran dan i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.	0	0	0	0	0
344	1.03.910131	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen		0	0	0	0	0
345	1.03.910132	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen		0	0	0	0	0
346	1.03.910133	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdas No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	0	0	0	0	0
347	1.03.910134	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen		0	0	0	0	1
348	1.03.910135	Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus		0	0	0	0	0
349	1.03.910136	Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara		0	0	0	0	0
350	1.03.910137	Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen		0	0	0	0	0
351	1.03.910138	Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen		0	0	0	0	0
352	1.03.910139	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan		0	0	0	0	0
353	1.03.910140	Layanan KKPR	Layanan		0	0	0	0	0
354	1.03.910141	Layanan Persetujuan KKPR	Layanan		0	0	0	0	0
355	1.03.910142	Laporan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan		0	0	0	0	0
356	1.03.910143	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0	0	1
357	1.03.910144	Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Berita Acara		0	0	0	0	1
358	1.03.910145	Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
359	1.03.910146	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan		0	0	0	0	0
360	1.03.910147	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi		0	0	0	0	0
361	1.03.910148	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen		0	0	0	0	0
362	1.03.910149	Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan		0	0	0	0	0
363	1.03.910150	SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang		0	0	0	0	0
364	1.03.910151	Data SHP Peta Dasar	Peta		0	0	0	0	0
365	1.03.910152	Publikasi informasi penataan ruang	Publikasi		0	0	0	0	0
366	1.03.910154	Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan		0	0	0	0	0
367	1.03.910158	Jumlah Bangunan Sabo	Unit	Bangunan Sabo merupakan bangunan pelindung dari lahar gunung berapi	0	0	0	0	0
368	1.03.910165	Jumlah Kawasan Rawa	Kawasan Rawa	...	0	0	0	0	0
369	1.03.910175	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dokumen Perizinan Pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air, permasalahan dan penyelesaian Kasus dalam kegiatan Rekomtek Perizinan, Evaluasi Rekomtek, Implementasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	0	0	0	0	0
370	1.03.910180	Jumlah Unit Air Baku	Unit	Jumlah unit air baku yang dioperasi dan dipelihara	0	0	0	0	0
371	1.03.910181	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0
372	1.03.910182	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung dan Masyarakat	Orang	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan Gedung Hijau dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.	0	0	0	0	0
373	1.03.910183	Jumlah Dokumen rencana teknis rinci TPA, TPST, SPA	Dokumen	Dokumen rencana teknis rinci Perencanaan teknik terinci merupakan perencanaan detail TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	0	0	0	0	0
374	1.03.910184	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST	Dokumen	Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang menjadi pedoman pengelola TPA/TPST dalam mengoperasikan TPA/TPST	0	0	0	0	0
375	1.03.910185	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST	Dokumen	Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang harus dilakukan oleh pengelola TPA/TPST dalam melaksanakan penataan termasuk revitalisasi atau rehabilitasi TPA/TPST	0	0	0	0	0
376	1.03.910191	Jumlah dokumen legal yang disahkan	Dokumen	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dalah panduan rancang bangun suatu	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota. Dokumen RTBL yang disahkan sebagai Pergub/Perbub/Perwal menjadi dokumen rujukan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung di daerah dan aturan pemanfaatan tata ruang. Kawasan Sistem Perkotaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Kegiatan Lokal) atau Pusat Kegiatan Wilayah yang diusulkan Provinsi serta kawasan strategis lainnya yang memegang peranan penting skala provinsi yang belum disebutkan.					
377	1.03.910192	Jumlah Dokumen RTBL	Dokumen	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi, Lintas Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota.	0	0	0	0	0
378	1.03.910210	Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.	0	0	0	0	0
379	1.03.910211	Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani	Unit	Jumlah Bangunan Gedung Negara: jumlah massa bangunan yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan unit	0	0	0	0	8
380	1.03.910212	Luas bangunan gedung negara yang ditangani	M2	Luas Bangunan Gedung Negara: luas bangunan gedung negara yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan m2	0	0	0	0	0
381	1.03.910213	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan	0	0	0	0	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala (PP Nomor 16 Tahun 2021)					
382	1.03.910214	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provinsi	Dokumen	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara (PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018)	0	0	0	0	0
383	1.03.910215	ketersediaan Pengelola Teknis yaitu tenaga teknis perangkat daerah yang tersertifikasi yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN untuk membantu perangkat daerah dalam pembangunan BGN	Orang		0	0	0	0	0
384	1.03.910216	Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)	Dokumen	Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasarana. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. (PP Nomor 22 Tahun 2021)	0	0	0	0	0
385	1.03.910217	Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR)	Dokumen	RTRW Provinsi: Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. RDTR: Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. KRK/KKPR: Kesesuaian	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Kegiatan Pemanfaatan Ruang, merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Sebagai acuan administrasi pertanahan, KKPR berfungsi sebagai pengganti izin lokasi. (Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021)					
386	1.03.910218	Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah	Dokumen	SK Cagar Budaya: pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya. (UU Nomor 11 Tahun 2010)	0	0	0	0	0
387	1.03.910219	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi	Dokumen	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPARDA): Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalamnya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang Pariwisata. (UU Nomor 10 Tahun 2009)	0	0	0	0	0
388	1.03.910227	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan adalah massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan yang ditangani	0	0	0	0	0
389	1.03.910228	Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Luas Kawasan adalah besaran (dalam m2) massa bangunan dan lingkungan di sekitrar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	0	0	0	0	0
390	1.03.910229	Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Jumlah Kawasan adalah jumlah kesatuan massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	0	0	0	0	0
391	1.03.910230	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala	0	0	0	0	1
392	1.03.910231	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provins	Dokumen	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara.â€	0	0	0	0	0
393	1.03.910232	Permohonan tenaga/tim Pengelola Teknis pada Dinas teknis Provinsi	Dokumen	Pengelola Teknis: Tenaga teknis kementerian dan/atau OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Bangunan Gedung Negara, yang ditugaskan untuk membantu K/L dan/atau OPD dalam Pembangunan Bangunan Gedung Negara					
394	1.03.910234	dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)	Dokumen	Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasarana pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.	0	0	0	0	0
395	1.03.910236	Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah	Dokumen	SK Cagar Budaya adalah penetapan pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur.	0	0	0	0	0
396	1.03.910237	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB): Dokumen perencanaan periode 5 tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja kebencanaan yang menghasilkan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan	0	0	0	0	0
397	1.03.910238	Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA)	Dokumen	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPARDA): Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalamnya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang Pariwisata	0	0	0	0	0
398	1.03.910239	Penetapan daerah rawan bencana oleh	M2	Besaran daerah rawan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemda	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Pemerintah/Pemerintah Daerah							
399	1.03.910240	Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya	0	0	0	0	0
400	1.03.910241	Dokumen RTBL di Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota. Dokumen RTBL yang disahkan sebagai Pergub/Perbub/Perwal menjadi dokumen rujukan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung di daerah dan aturan pemanfaatan tata ruang. Kawasan Sistem Perkotaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Kegiatan Lokal) atau Pusat Kegiatan Wilayah yang diusulkan Provinsi serta kawasan strategis lainnya yang memegang peranan penting skala provinsi yang belum disebutkan.	0	0	0	0	0
401	1.03.910242	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Kabupaten/Kota	Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota dan merekapitulasi Kabupaten/Kota yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan	0	0	0	0	0
402	1.03.910243	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan per Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan Pembinaan dan Pengawasan: Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan di setiap kabupaten/kota dalam periode satu tahun	0	0	0	0	0
403	1.03.910252	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat berupa: 1. Anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398); atau 2. Aerob	0	0	0	0	0
404	1.03.910253	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik(IPALD)/ sub-sistem pengolahan terpusat	MÂ³/Hari	Kapasitas IPALD/sub-sistem pengolahan terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPALD tiap harinya dalam satuan M3	0	0	0	0	0
405	1.03.910254	Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik	Sambungan Rumah (SR)	sambungan rumah/sub-sistem pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan, terdiri atas: a. Pipa b. Pipa	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				non c. Bak perangkap lemak dan minyak dari d. Pipa e. Bak dan f. Lubang inspeksi					
406	1.03.910255	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.	0	0	0	0	0
407	1.03.910256	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	Rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja	0	0	0	0	0
408	1.03.910257	Jumlah warga negara penerima layanan penyediaan air minum	Jiwa	Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Dokumen Penetapan Kawasa Strategis Provinsi	0	0	0	0	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	1.04.000004	Backlog Kepemilikan Rumah	Unit Rumah	Data sekunder rekapitulasi backlog kepemilikan rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS.	97.825	97.806	97.753	93.820	89.601
2	1.04.000010	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang berkomitmen menerima bantuan	27	14	41	15	9
3	1.04.000011	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	27	14	41	15	9
4	1.04.000015	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk pembangunan kembali bagi korban bencana provinsi.	27	14	0	0	0
5	1.04.000019	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk rehabilitasi bagi korban bencana provinsi.	0	9	41	15	9
6	1.04.000021	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk relokasi bagi korban bencana provinsi.	0	49	102	0	0
7	1.04.000023	Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Dokumen	Dokumen data pembentukan Tim Satgas, pendamping, dan fasilitator adalah SK (Surat Keputusan)	1	1	1	0	1
8	1.04.000025	Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Provinsi, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	3	3	3	3	3
9	1.04.000041	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Provinsi	Dokumen	Dokumen BA serah terima aset Pemda kepada masyarakat, Sertifikat Hak Milik masyarakat	0	27	41	15	9

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
10	1.04.000043	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	Dokumen BA serah terima aset Pemda kepada masyarakat, Sertifikat Hak Milik masyarakat	0	0	0	0	0
11	1.04.000048	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen	Jumlah dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	0	0	0	0	0
12	1.04.000064	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	0	0	0	0	0
13	1.04.000074	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi, serta diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	0	0	0	0	0
14	1.04.000075	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi.	0	0	0	0	0
15	1.04.000076	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi	0	0	0	0	0
16	1.04.000079	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	0	0	0	0	0
17	1.04.000081	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				dalam Kawasan Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)					
18	1.04.000084	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas: 1. Laporan kendala penerapan SPM 2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM 3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti) 4. Jumlah unit rumah yang tertangani 5. Jumlah rumah tangga yang terlayani	0	0	0	0	0
19	1.04.000094	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. DED dan RAB 5. Progres pelaksanaan pembangunan	0	0	0	0	0
20	1.04.000101	Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Aktivitas pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.	0	0	0	0	0
21	1.04.000104	Laporan pelaksanaan proses peremajaan/pemugaran permukiman kumuh	Laporan	Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal. Penanganan kumuh dilakukan pada kawasan kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha baik yang berada di lintas kabupaten/kota ataupun dalam satu kabupaten/kota dan ditetapkan dalam SK Kumuh Provinsi. Digunakan untuk mengakomodir layanan sbb: (1) Biaya pembongkaran bangunan eksisting, (2) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED), serta (3) Revitalisasi rumah susun, dalam rangka Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	0	0	0	0	0
22	1.04.000128	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha	Data rinci luas permukiman kumuh kewenangan provinsi yang ditangani melalui Pemugaran. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan	203,41	57	5,32	2,33	3,137

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal.					
23	1.04.000147	Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	Orang	Daftar jumlah orang dan nama peserta kegiatan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi	0	0	0	0	0
24	1.04.000152	Rencana Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	Dokumen yang memuat kebutuhan dan rencana penyediaan PSU Permukiman	0	4	9	5	4
25	1.04.000155	Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang terbangun	Unit Rumah	Jumlah rumah yang memenuhi kriteria berat dan dilakukan pembangunan kembali sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni.	27	14	27	15	9
26	1.04.000172	Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Jumlah rumah yang memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang dan dilakukan rehabilitasi sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni.	0	9	41	15	9
27	1.04.000185	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi	69	58	61	207	89
28	1.04.000186	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit Rumah	Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Provinsi	0	0	0	0	0
29	1.04.000192	Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU permukiman	Unit Rumah	Jumlah rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU Permukiman.	862	108	75	116	34
30	1.04.000195	Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 65%, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.	2.136	2.136	2136	2.136	78
31	1.04.000197	Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30%, kerusakan terutama pada komponen non-struktural seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.	10.786	10.786	10.786	10.786	572
32	1.04.000199	Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 45%, kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti atap dan lantai.	3.046	3.046	3.046	3.046	352
33	1.04.000244	Jumlah lokasi permukiman yang dilaksanakan perbaikan PSU	Lokasi	Jumlah lokasi permukiman yang dilaksanakan perbaikan PSU	11	4	7	5	5
34	1.04.000247	Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Lokasi	Peta sebaran dan titik koordinat lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu: 1. kawasan rawan bencana berisiko tinggi, 2. kawasan negative list perumahan, dan 3. kawasan permukiman kumuh berat. Data	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				bersumber dari: 1. Data BPBD Provinsi, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.					
35	1.04.000270	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan provinsi	0	19	53	38	75
36	1.04.000275	Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya	Unit	Jumlah rumah di lokasi kumuh dapat dilihat dari data hasil survey sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perencanaan teknis bidang perumahan kumuh dan data survey primer	3	0	0	0	0
37	1.04.000276	Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)	Unit	Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bahaya yaitu sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan rel KA, di kolong jembatan, di bawah SUTET yang bersumber RP3KP.	0	0	0	0	0
38	1.04.000277	Jumlah rumah di lokasi rawan bencana	Unit	Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bencana dengan risiko tinggi.	14.321	14.321	14.321	14.321	997
39	1.04.000278	Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan	Unit	Jumlah rumah yang tidak sesuai dengan tata guna lahan dapat dilihat dari data hasil survey sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RDTR, dan data survey primer	0	0	0	0	0
40	1.04.000288	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah sarana yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi permukiman. Sarana antara lain: pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka, taman, lapangan olah raga, pemakaman, lahan parkir, serta pelayanan umum dan pemerintahan.	0	0	0	0	0
41	1.04.000291	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah utilitas yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi permukiman. Jenis utilitas antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan sarana penerangan jasa umum.	0	0	0	0	0
42	1.04.000292	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah utilitas yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi permukiman. Jenis utilitas antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan sarana penerangan jasa umum.	0	0	0	0	0
43	1.04.000293	Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	Jumlah dokumen yang menjelaskan Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari perbaikan yang dilaksanakan.	0	0	0	0	0
44	1.04.000295	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	Laporan kegiatan sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat terdiri dari: 1. KAK/TOR kegiatan 2. RAB kegiatan 3. Hasil pelaksanaan kegiatan 4. Dokumentasi kegiatan	0	0	0	0	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	1.05.000010	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Mitigasi Bencana	Orang	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memperoleh Pelatihan Mitigasi Bencana untuk dukungan peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan dan memberikan pelatihan mitigasi bencana yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	70	0	40	50	40
2	1.05.000011	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memperoleh Pelatihan Pencegahan Bencana untuk dukungan peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan dan memberikan pelatihan pencegahan bencana yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	400	0	50	50	40
3	1.05.000012	Data Kebencanaan	Dokumen	Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh validata bencana yang disediakan secara Bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana berpotensi menjadi urusan provinsi	1	1	1	1	1
4	1.05.000019	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1	0	0	0	0
5	1.05.000037	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	Kegiatan bersama untuk menyusun tehnik atau cara Pencegahan Kejahatan	0	0	0	1	0
6	1.05.000055	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas layanan Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana berupa laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan dukungan untuk kabupaten/kota (misal: prosedur dukungan sistem peringatan dini tsunami kabupaten/kota) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis)	1	1	1	1	1
7	1.05.000057	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas layanan Pusat Pengendalian	1	1	1	1	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Operasi Kesiapsiagaan Bencana berupa laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan dukungan untuk kabupaten/kota (misal: prosedur dukungan sistem peringatan dini tsunami kabupaten/kota) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis)					
8	1.05.000067	Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	Laporan	Berita Acara Pemeriksaan atas pelanggaran Perda, melalui proses Yustisi yang dilakukan oleh PPNS, melalui wadah Sekretariat PPNS	0	0	0	1	1
9	1.05.000068	Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Perkara yang dapat disidangkan di tempat	Laporan	Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan atas pelanggaran Perda oleh PPNS, yang disidangkan melalui Sidang di Tempat	0	0	0	2	1
10	1.05.000072	Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) yang Disusun	Dokumen	Merupakan dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi melalui penyusunan dokumen JITU PASNA dan dokumen R3P yang menjadi kewenangan provinsi	1	1	0	1	1
11	1.05.000079	Dokumen Rencana Kontijensi	Dokumen	Dokumen Rencana Kontijensi Provinsi merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas provinsi dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan provinsi	0	1	1	1	0
12	1.05.000084	Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	Merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD provinsi bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu melalui penyusunan dokumen R3P yang menjadi kewenangan provinsi	0	1	1	1	0
13	1.05.000095	Dokumen yang Memuat Data Dampak Kebakaran yang terintegrasi dan Valid	Dokumen	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi terkait kejadian dan dampak kebakaran serta upaya-upaya penyelamatan	0	0	0	1	1
14	1.05.000107	Informasi Kebencanaan	Dokumen	Informasi kebencanaan adalah informasi mengenai Bencana yang tersusun berdasar kriteria tertentu yang disediakan secara bersama	1	1	1	1	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi kewenangan provinsi					
15	1.05.000130	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran	Laporan	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pelaksanaan tindakan yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan terkait kebakaran, dan tindakan darurat non-kebakaran	0	0	0	4	1
16	1.05.000131	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	Laporan	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pelaksanaan tindakan yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan terkait kebakaran, dan tindakan darurat non-kebakaran	0	0	0	4	1
17	1.05.000132	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pelaksanaan tindakan yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan terkait kebakaran, dan tindakan darurat non-kebakaran	0	0	0	4	1
18	1.05.000134	Laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	Berisi laporan hasil koordinasi penanganan awal pelaksanaan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	0	0	0	0	0
19	1.05.000170	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	0	0	1	1	1
20	1.05.000171	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Gubernur	0	0	1	1	0
21	1.05.000179	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri	0	0	1	2	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda		Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda					
22	1.05.000180	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0	0	1	2	1
23	1.05.000185	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah	Laporan	sosialisasi perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	0	0	1	0	0
24	1.05.000186	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Gubernur	Laporan	sosialisasi Peraturan Gubernur kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	0	0	1	0	0
25	1.05.000192	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	0	0	1	1	1
26	1.05.000198	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Laporan	Berisikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menajdi kewenangan provinsi meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di tingkat provinsi	0	1	1	1	1
27	1.05.000207	Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	Laporan	Merupakan laporan pelaksanaan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana bagi aparatur provinsi dan kabupaten/kota untuk jenis bencana prioritas provinsi	1	1	1	1	0
28	1.05.000211	Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan	Berisikan laporan hasil Koordinasi penanganan awal pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah penyakit yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	0	1	1	1	0
29	1.05.000212	Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	Berisikan laporan hasil pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	1	1	1	1	1
30	1.05.000217	Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah orang/aparatur/personil yang tersedia untuk melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) untuk mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan kabupaten/kota dalam	80	0	50	40	50

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana lintas kabupaten/kota					
31	1.05.000218	Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	Merupakan penyediaan alat pelindung diri bagi aparat dan petugas penanggulangan bencana tingkat provinsi	0	0	0	0	0
32	1.05.000222	Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Provinsi yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi/ dukungan bagi dan/atau antar kabupaten/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	0	0	0	84	0
33	1.05.000223	Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal daurat bencana antar kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	0	0	0	84	0
34	1.05.000226	Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	Merupakan penyediaan dokumen regulasi Penanggulangan Bencana Provinsi untuk pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan provinsi	1	0	0	0	0
35	1.05.000235	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Penanggulangan Kebakaran sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	4	4	4	4
36	1.05.000256	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kecakapan yang dimiliki aparaturnya sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana	0	0	0	0	0
37	1.05.000257	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P), dengan target pelaksanaan 1 kali dalam satu tahun	0	0	25	20	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
38	1.05.000258	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Lembaga	Fasilitasi yang dilakukan BPBD Provinsi untuk meningkatkan keterlibatan Lembaga non pemerintah : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	2	2	0	0	0
39	1.05.000260	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan penangananan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	0	0	84	0
40	1.05.000261	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Dokumen	Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah	0	0	0	0	0
41	1.05.000262	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan penyediaan dokumen sah dan legal yang menggambarkan kebijakan operasional, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana tingkat provinsi, dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi, dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan	0	0	0	1	0
42	1.05.000263	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	0	0	1	1	1
43	1.05.000269	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	Kegiatan Diklat atau Bimtek dalam rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	0	0	80	0	0
44	1.05.000270	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014	0	0	0	0	0
45	1.05.000271	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan dokumen hasil kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang menjadikan Pemerintah Pusat, Pemda dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Perda dan Perkada Penyelenggaraan Ketenteraman,	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi					
46	1.05.000272	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam hal Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan dan dalam pelaksanaannya PPNS dapat meminta bantuan POL PP maupun Kepolisian	0	0	1	1	1
47	1.05.000281	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	Pengadaan dan pemeliharaan sarpras yang pemanfaatannya untuk Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti Penegakkan Perda	0	0	0	0	0
48	1.05.000283	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	0	0	0	0
49	1.05.000284	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	Bentuk kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0
50	1.05.000285	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	0	1	1	1	1
51	1.05.000286	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	0	0	0	0	0
52	1.05.000287	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem		Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen mengenai standar perencanaan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sah dan legal untuk memberikan pedoman yang lengkap dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)					
53	1.05.000288	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	Pelaksanaan butir kegiatan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	0	0	0	0	0
54	1.05.000289	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	Aparatur Satpol PP Provinsi dan lintas Kab/Kota yang mengikuti Pelatihan Teknis Satpol PP antara lain : 1. Deteksi dini dan cegah dini 2. Pembinaan dan penyuluhan penegakkan perda dan perkara 3. Teknik pengawalan, pengamanan dan patroli 4. Teknik penanganan unjuk rasa 5. Teknik penyelidikan dan penyidikan yustisi dan non yustisi 6. Teknik pemberkasan perkara 7. Teknik negoisasi dan mediasi 8. Teknik penyusunan perda dan perkara 9. Teknik mobilisasi Satlinmas	0	0	80	0	0
55	1.05.000290	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	Pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019	0	0	0	0	0
56	1.05.000291	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan	0	1	1	1	1
57	1.05.000292	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung	0	0	2	2	1
58	1.05.000293	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	0	1	1	1	1
59	1.05.000294	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Laporan	Laporan pelaksanaan koordinasi lintas perangkat daerah yang memuat : 1. Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan BPBD Provinsi untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas 2. Capaian pemenuhan pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	1	1	1	1	1
60	1.05.000345	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Dokumen	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan	0	0	1	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota, dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi, dilaksanakan apabila diperlukan penyusunan baru (pemutakhiran).					
61	1.05.000346	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. seperti: Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana, Kawasan Industri Tangguh Bencana, Fasilitasi pembinaan desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana dsb, dengan alat ukur Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.	0	1	1	1	1

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	1.06.000003	Alat bantu yang diterima penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Unit	Alat bantu yang diterima oleh penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	0	152	0	0	0
2	1.06.000010	Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	1569	1412	1027	980	784
3	1.06.000011	Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah)	1569	1412	1027	980	784
4	1.06.000014	Anak telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Anak telantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	1569	1412	1027	980	784
5	1.06.000015	Anak telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	1569	1412	1027	980	784
6	1.06.000017	Anak telantar yang mendapatkan permakanan	Orang	Anak telantar di dalam panti yang mendapatkan permakanan sesuai	1569	1412	1027	980	784

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti		Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi					
7	1.06.000019	Anak telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Anak terlantar di dalam panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	1569	1412	1027	980	784
8	1.06.000056	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1200	0	25	500	0
9	1.06.000058	Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	Keluarga	Fasilitasi pengentasan fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya	1200	0	25	500	0
10	1.06.000068	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi meliputi pembuatan barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya	5000	4200	2250	700	50
11	1.06.000069	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	&Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	5000	4200	2250	700	50
12	1.06.000070	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan	5000	4200	2250	700	150
13	1.06.000072	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat	5000	4200	2250	700	1000
14	1.06.000076	lanjut usia telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Lanjut usia telantar di dalam panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	37	41	47	38	33
15	1.06.000077	lanjut usia telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi lanjut usia terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	37	41	47	38	33
16	1.06.000080	lanjut usia telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	37	41	47	38	33
17	1.06.000082	lanjut usia telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Lanjut usia terlantar di dalam panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi	37	41	47	38	33

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah					
18	1.06.000092	Makam pahlawan	Makam	Makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan yang dikelola oleh Provinsi	713	713	713	713	718
19	1.06.000095	Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Orang	Pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial	1200	0	25	500	0
20	1.06.000096	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	6	6	6	6	6
21	1.06.000099	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersedia yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan di bidang kesejahteraan sosial	1120	1120	1120	1120	1120
22	1.06.000101	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	6	6	6	6	6
23	1.06.000104	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial anak terlantar	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan panti sosial anak terlantar	0	0	0	0	0
24	1.06.000106	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial lanjut usia terlantar	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman, halaman, jaringan, dan kendaraan di panti sosial lanjut usia terlantar	0	0	0	2	11
25	1.06.000109	Pemulasaraan	Kegiatan	Pelaksanaan pemulasaraan sesuai dengan agama Lanjut Usia Terlantar di dalam panti	0	0	7	5	1
26	1.06.000126	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	0	152	150	165	150
27	1.06.000127	Penyandang disabilitas terlantar yang menerima	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang menerima kebutuhan	0	0	150	0	150

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		kebutuhan sandang di dalam panti		sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah					
28	1.06.000140	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal sampai ibu kota daerah kabupaten/kota	0	0	0	4	0
29	1.06.000150	Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi	Unit	Komponen utama (monumen/tugu, plaza upacara, jalan utama, dst) maupun komponen penunjang (pertamanan, halaman parkir, rumah petugas, dst) di Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	0	0	0	0	0
30	1.06.000151	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial anak terlantar	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang dimiliki panti sosial anak terlantar	29	29	29	29	29
31	1.06.000153	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial lanjut usia telantar	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang dimiliki panti sosial lanjut usia terlantar	13	13	13	13	14
32	1.06.000155	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang tersedia di panti sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	34	34	35	36	38
33	1.06.000156	Standar sarana prasarana panti sosial anak terlantar	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan panti sosial anak terlantar	0	0	0	0	0
34	1.06.000158	Standar sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan di panti sosial lanjut usia terlantar	0	0	0	10	10
35	1.06.000162	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	118	118	118	118	118
36	1.06.000164	Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial anak terlantar	1	0	0	1	1
37	1.06.000169	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	warga negara migran yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu	0	0	0	0	36
38	1.06.000170	Taruna Siaga Bencana	Orang	Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan	1366	956	950	816	806

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana					
39	1.06.000171	Komunitas Adat Terpencil pada Daerah Otorita Baru	Komunitas	Jumlah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik	47	47	53	228	0
40	1.06.000172	Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL pada Daerah Otorita Baru	Orang	Jumlah Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	0	0	0	0	0
41	1.06.000173	Institusi Penerima Wajib Lapo di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk pada Daerah Otorita Baru	Instansi	Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapo di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk	0	0	0	0	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.07.000001	Angkatan Kerja (AK)	Orang	jumlah dan kualitas Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran	812652	839190	860344	868.581	901.758
2	2.07.000066	Penduduk Usia Kerja (PUK)	Orang	jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang disebut juga tenaga kerja	1270421	1289637	1308543	1.326.840	1.432.063
3	2.07.000080	Persediaan Tenaga Kerja	Orang	jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya	1217956	1240774	1264414	1286798	1309456
4	2.07.000088	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	Perusahaan	Perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan dalam sistem WLKP Online	1045	267	339	757	2399
5	2.07.000100	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	Produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara nilai PDRB dengan jumlah PYB yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi PYB dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi pada suatu lapangan usaha secara nasional dan regional	40,95	39,66	39,81	41,51	41,40
6	2.07.000120	Upah Minimum Kabupaten/Kota	Surat Keputusan	Jumlah Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota	4	1	1	1	1
7	2.07.000121	Upah Minimum Provinsi	Surat Keputusan	Jumlah Surat Keputusan Upah Minimum Provinsi	1	1	1	1	1
8	2.07.000122	Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap pembayaran DKPTKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja	0	0	0	0	0
9	2.07.000125	Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi	Dokumen	Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk optimalisasi Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Pelatihan Kerja yang diwujudkan dengan kesepakatan antar lembaga terkait					
10	2.07.000126	Perusahaan Menengah	Perusahaan	Perusahaan yang memperoleh Bimbingan Konsultansi Peningkatan Produktivitas oleh satuan kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Provinsi, dan bidang pelatihan dan produktivitas pada Dinas Daerah yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di perusahaan berdasarkan Kepdirjen Binalattas Nomor 2/268/HK.05/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Konsultansi Peningkatan Produktivitas	0	0	0	0	0
11	2.07.000127	Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal	Lembaga	Pengawasan terhadap Lembaga berbadan hukum PT (LPTKS dan Job Portal) dan Lembaga berbadan usaha (LPPRT) yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri	0	0	0	0	0
12	2.07.000128	Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL	Orang	Pencari kerja yang mendapatkan layanan AKAD dan AKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan baik untuk sementara waktu maupun tetap, serta pelayanan kepada pengguna tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya	0	0	0	0	0
13	2.07.000129	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS	Perusahaan	Perusahaan yang terdaftar sebagai Lembaga berbadan hukum PT yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri	0	0	0	0	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.08.000004	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup Anak kewenangan provinsi	Orang	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA	0	0	0	35	27
2	2.08.000007	Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Dokumen	Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat provinsi	1	0	0	1	1
3	2.08.000010	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak	0	0	0	1	1
4	2.08.000014	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data provinsi	1	0	0	1	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
5	2.08.000016	DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat provinsi	0	0	0	1	1
6	2.08.000022	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi	0	0	0	6	6
7	2.08.000027	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia layanan tingkat provinsi	0	0	0	0	0
8	2.08.000030	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Layanan	Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan provinsi	0	0	0	25	213
9	2.08.000033	Lembaga penyedia Layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLPP yang ditetapkan oleh KPPPA	1	1	1	1	1
10	2.08.000035	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada Pedoman Standardisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mencakup penguatan kelembagaan, SDM, Sarana & Prasarana, KIE & Modul, Penyelenggaraan Layanan dan Sinergitas & Koordinasi tingkat daerah provinsi.	0	0	0	1	1
11	2.08.000037	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan provinsi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi	0	0	0	0	0
12	2.08.000040	Organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan provinsi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	0	0	0	7	35
13	2.08.000046	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan	Perangkat Daerah	Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah	0	0	0	7	15

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		terkait di provinsi sesuai kebutuhan, seperti penyusunan dokumen PPRG dengan baseline IKK/ data pembangunan keluarga lain atau pelaksanaan teknis lainnya.					
14	2.08.000050	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) advokasi/ penguatan/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2) pendampingan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah yg responsif gender, serta PUG dalam pengawasan di daerah	0	0	0	20	20
15	2.08.000052	Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	Pemberian layanan sesuai kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi khusus antara lain bencana, konflik, dan pengungsi kewenangan provinsi	0	0	0	3	44
16	2.08.000053	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	0	0	0	60	195
17	2.08.000056	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat provinsi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan pelopor &SIAP& yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator/champion dan pelopor aksi nyata di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	0	0	0	20	100
18	2.08.000058	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	0	0	0	30	0
19	2.08.000060	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mencakup substansi pada indikator kualitas keluarga atau permasalahan keluarga lainnya dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah provinsi.	0	0	0	0	0
20	2.08.000062	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	0	0	0	0	20
21	2.08.000063	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada	0	0	0	0	20

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		termasukPerencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)		pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG					
22	2.08.000064	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajemen kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi	0	0	0	0	0
23	2.08.000065	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi	0	0	0	0	277
24	2.08.000066	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA	0	0	0	0	1

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.09.000076	Data daerah rentan rawan pangan	Laporan	data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3.	1	1	1	1	1
2	2.09.000077	Data direktori konsumsi pangan	Laporan	Direktori Konsumsi pangan berisi data/informasi konsumsi pangan dan skor PPH wilayah disajikan antar tahun/time series	0	1	1	1	1
3	2.09.000081	Data Konsumsi Pangan	Dokumen	Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	0	1	1	1	1
4	2.09.000086	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala	Laporan	Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala	1	1	1	1	1
5	2.09.000104	Jumlah Edukasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya jenis kegiatan edukasi konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilakukan kepada anak sekolah/mahasiswa/kelompok masyarakat/masyarakat umum	0	0	1	1	1
6	2.09.000108	Jumlah izin edar PSAT PD per tahun	Dokumen	Jumlah izin edar PSAT PD untuk Pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun termasuk jumlah surveilen yang dilakukan	0	1	1	1	1
7	2.09.000119	Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar	Laporan	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau kegiatan dengan sebutan lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan	1	1	1	1	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi					
8	2.09.000123	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi berisikan data terkait jumlah pengadaan, jumlah yang dikelola dan jumlah yang disalurkan berdasarkan hasil koordinasi	0	0	1	1	1
9	2.09.000126	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kegiatan	Banyaknya kegiatan sosialisasi/promosi/kampanye/edukasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal yang dilakukan selama satu tahun	0	1	1	1	1
10	2.09.000132	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi berdasarkan indikator yang digunakan	0	0	1	1	1
11	2.09.000137	Jumlah Usaha Pangan Lokal	Laporan	Jumlah UMKM/UKM/keompok usaha yang mengolah aneka pangan berbahan baku lokal	0	0	1	1	1
12	2.09.000145	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	Banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta evaluasi terhadap target RPMJD/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target skor PPH sejalan dengan Perbadan nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan.	0	0	0	0	1
13	2.09.000146	Jumlah Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya jenis kegiatan sosialisasi konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilakukan kepada masyarakat umum	0	0	1	1	1
14	2.09.000147	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya kegiatan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan B2SA yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (gubernur/wakil gubernur/DPRD/OPD) dan atau dilakukan kepada anak sekolah/mahasiswa/keompok masyarakat	0	0	1	1	1
15	2.09.000148	Indeks Ketahanan Pangan Level Kecamatan	Dokumen	Ukuran dari indikator-indikator yang mewakili aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kecamatan) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya.	0	0	1	1	1
16	2.09.000154	Jumlah sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan per tahun	Sertifikat	Sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan segar berupa sertifikasi prima, sertifikasi organik, dan sertifikasi produk sesuai SNI yang diterbitkan dalam 1 tahun	0	1	15	16	17
17	2.09.000156	Jumlah health certificate (HC) per tahun	Dokumen	Jumlah health certificate (HC) untuk Pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun	0	0	0	1	1
18	2.09.000157	Jumlah izin sertifikat penerapan penanganan yang baik pangan segar asal	Dokumen	Jumlah SPPB-PSAT yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun termasuk jumlah surveilen yang dilakukan	0	1	1	1	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		tumbuhan (SPPB PSAT) per tahun							
19	2.09.000163	data cadangan pangan pemerintah provinsi	Dokumen	data cadangan pangan pemerintah provinsi, yaitu pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan	1	1	1	1	1
20	2.09.000188	Data pelaku usaha pangan segar	Dokumen	Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pangan Segar	0	0	1	1	1
21	2.09.000213	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara	Ton	Jumlah stok cadangan pangan pemerintah yang terpelihara	0	0	1	1	1
22	2.09.000217	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dokumen	Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya.	0	0	1	1	1
23	2.09.000219	Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Unit	Prasarana berupa laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki	0	0	1	1	1

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.11.000002	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh provinsi pada n-1	Laporan	Tersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	0	0	0	0
2	2.11.000003	Daerah yang melakukan kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional	Kabupaten/Kota	Tersedianya data daerah yang melakukan kerja sama dalam penanganan sampah di TPA/TPST Regional	0	0	0	0	0
3	2.11.000006	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	Terbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.	0	0	0	0	0
4	2.11.000010	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP	Laporan	Tersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0	0	0	0	0
5	2.11.000011	Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP	Laporan	Tersedianya data hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0	0	0	0	0
6	2.11.000012	Data hasil Validasi KLHS	Laporan	a. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnya	0	0	1	4	3
7	2.11.000013	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK	1	1	3	0	0
8	2.11.000015	Data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi	Dokumen	Tersedianya data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi/ lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya	0	0	0	0	0
9	2.11.000016	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Data	Data sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaran	23	22	21	19	17

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
10	2.11.000017	Data pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi	Dokumen	Tersedianya data terkait pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi	2	0	2	2	2
11	2.11.000019	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya identifikasi TPB	0	0	0	0	0
12	2.11.000020	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH	Laporan	a. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0	0	0	0	0
13	2.11.000021	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	0	0	0	0	0
14	2.11.000022	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya rumusan skenario TPB	0	0	0	0	0
15	2.11.000025	Dokumen & Data inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	Tersedianya data inventarisasi lingkungan hidup lintas kabupaten/kota yang mendukung pemenuhan RPPLH	0	0	0	0	0
16	2.11.000027	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh provinsi s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlaku.	0	0	0	0	0
17	2.11.000029	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	0	0	0	0	0
18	2.11.000030	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Tersedianya data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan.	0	0	0	0	0
19	2.11.000036	Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan yang dilakukan pada kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA	0	0	0	0	0
20	2.11.000040	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Dokumen	Tersedianya dokumen telaahan pelaporan pelaksanaan RPPLH Provinsi	0	0	0	0	0
21	2.11.000042	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
22	2.11.000043	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	Tersedianya dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	0	0	0	0	0
23	2.11.000045	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh Provinsi s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	0	0	4	0
24	2.11.000047	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	0	0	0	3	0
25	2.11.000050	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	Informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	0	0	0	0	0
26	2.11.000053	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	15	7	1	0	0
27	2.11.000054	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan	Izin	Tersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	3	3	9	9	9
28	2.11.000055	Izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan provinsi s.d. n-1	Izin	Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	0	0	0	0
29	2.11.000057	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah provinsi	0	0	14	18	13
30	2.11.000059	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	3	3	9	9	9
31	2.11.000061	Kapasitas pengoperasional TPA/TPST Regional	Ton	1. Data Jumlah TPA/TPST Regional 2. Kapasitas Operasional setiap TPA/TPST Regional 3. Data biaya operasional setiap TPA/TPST Regional per ton	0	0	0	0	0
32	2.11.000062	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	Dokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLH	0	0	0	0	0
33	2.11.000065	Kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional	Unit	Data sarana prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional	0	0	0	0	0
34	2.11.000071	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan	0	0	0	0	0
35	2.11.000072	Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH	Kelompok	Jumlah kelompok MHA yang telah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan, kemitraan, penampingan dan penguatan yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0
36	2.11.000074	Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH	Kelompok	Data jumlah kelompok MHA terkait dengan PPLH yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan mekanisme/tata cara yang diatur pada peraturan perundangan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
37	2.11.000075	Keluarga yang diidentifikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga	Jumlah Keluarga yang diidentifikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	0	0	0	0	0
38	2.11.000076	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	0	0	0	0	0
39	2.11.000077	Kontribusi pembiayaan dari kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional	Rupiah	Data biaya operasional yang harus di tanggung APBD Provinsi untuk setiap TPA/TPST Regional	0	0	0	0	0
40	2.11.000079	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	6	6	15	12	13
41	2.11.000080	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi maupun aktivitas remediasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	0	0	0	0	0
42	2.11.000082	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau provinsi	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1	1	1	1	1
43	2.11.000085	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Rincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan/atau lembaga lain	0	0	7	2	6
44	2.11.000086	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan yang telah dilakukan	0	0	0	0	0
45	2.11.000088	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	Dokumen laporan dan bukti-bukti pendukung lainnya terkait hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	2	0	2	2	2
46	2.11.000089	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	Data sarpras penanganan sampah regional di TPA/TPST Regional	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		penanganan sampah di TPA TPST Regional							
47	2.11.000091	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Laporan	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	0	0	0	0	0
48	2.11.000093	Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	Laporan hasil koordinasi terkait pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	0	0	0	2	3
49	2.11.000098	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0	1	2	2	2
50	2.11.000099	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	0	0	0	0	0
51	2.11.000101	Laporan hasil Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi	1	1	1	1	1
52	2.11.000103	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi di 5 sektor	Dokumen	Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan/atau lembaga lain	0	0	7	2	6
53	2.11.000105	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	Laporan hasil sosialisasi dan penyampaian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	1	0	1	1	1
54	2.11.000106	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	0	0	0	0	0
55	2.11.000107	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0
56	2.11.000109	Lembaga kemasyarakatan/kelompok	Lembaga	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala provinsi eksisting		terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan					
57	2.11.000115	Lokasi Proklim yang dibina oleh Provinsi	Lokasi	Data lokasi proklim di provinsi	0	3	14	25	27
58	2.11.000119	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	0	0	0	0	0
59	2.11.000121	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	1. Tersedianya data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi 2. Tersedianya data Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	0	0	0	0	0
60	2.11.000123	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	1. Tersedianya data jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi 2. Tersedianya data Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	0	0	0	0	0
61	2.11.000124	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu yang telah dilakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan metode penyuluhan & kampanye lainnya terkait lingkungan hidup	0	0	300	400	135
62	2.11.000125	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	0	0	0	1	8
63	2.11.000126	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0	0	0	1	8
64	2.11.000127	Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Materi	Jumlah Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	0	0	0	0	0
65	2.11.000128	Nilai IKA n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku	57,56	55,67	55,56	52,08	55,87
66	2.11.000129	Nilai IKAL n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas air laut pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air laut sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	66,67	86,07	89,28	81,88
67	2.11.000130	Nilai IKLH n-1	Poin	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL.	79,55	75,98	78,23	77,69	78,75

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
68	2.11.000131	Nilai IKTL n-1	Poin	Nilai yang menunjukkan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku	89,17	88,4	90,21	90,21	90,73
69	2.11.000132	Nilai IKU n-1	Poin	Nilai yang menunjukkan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku	88,72	90,41	90,7	91,46	92,47
70	2.11.000133	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidup	0	0	0	0	0
71	2.11.000134	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	Aduan	Data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	0	0	0	3	0
72	2.11.000136	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	Data permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintah	8	3	1	0	0
73	2.11.000137	Permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	Data hasil verifikasi atas Permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	0	0	0	0	0
74	2.11.000138	Permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diProses	Dokumen	Data hasil verifikasi atas Permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	0	0	0	0	0
75	2.11.000143	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	data dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah	0	0	14	18	13
76	2.11.000144	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	0	14	18	13
77	2.11.000145	Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Data hasil verifikasi atas permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang disetujui dan diterbitkan	0	0	0	0	0
78	2.11.000147	PPLHD Eksisting	Orang	Data PPLHD yang aktif	0	0	0	6	5
79	2.11.000148	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud	0	0	0	0	5
80	2.11.000149	PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Data kebutuhan PPLHD	0	0	0	0	9
81	2.11.000154	RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	Data jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
82	2.11.000155	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Unit	Data jumlah unit Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	0	0	0	0	0
83	2.11.000157	Sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional eksisting	Unit	1. Data biaya pemeliharaan Sarpras 2. Data biaya operasional Sarpras TPA/TPST regional (Rp/tahun atau Rp/bulan)	0	0	0	0	0
84	2.11.000162	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	Data Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	0	0	0	0	0
85	2.11.000164	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	Data jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	0	0	0	0	0
86	2.11.000165	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	0	12	24	24	24
87	2.11.000166	TPA/TPST Regional yang beroperasi	Unit	1. Tersedianya data Jumlah TPA/TPST Regional 2. Tersedianya Kapasitas Operasional setiap TPA/TPST Regional 3. tersedianya data biaya operasional setiap TPA/TPST Regional per ton	0	0	0	0	0
88	2.11.000168	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/Kegiatan	Tersedianya data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	0	0	0	0	0
89	2.11.000169	Volume residu sampah yang dilakukan pemrosesan akhir TPA/TPST Regional	Ton	Data jumlah residu sampah yang masuk di TPA/TPST Regional	0	0	0	0	0
90	2.11.000170	Volume sampah dari kerjasama penanganan sampah	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang terkelola dari kerja sama dalam penanganan sampah	0	0	0	0	0
91	2.11.000178	Volume timbunan sampah yang masuk ke TPA/TPST Regional	Ton	Data jumlah timbunan sampah yang diolah di TPA/TPST Regional	0	0	0	0	0
92	2.11.000179	Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst	Dokumen	Data terkait mutu air, mutu udara, mutu air laut, pengelolaan ekosistem gambut, dan pengelolaan karst pada tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
93	2.11.000182	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di provinsi yang beroperasi dan terpelihara	Unit	Data jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah provinsi, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	0	0	0	0	0
94	2.11.000183	Jumlah data contoh uji	Data	Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	0	0	0	0	0
95	2.11.000184	Jumlah data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	0	0	0	0	0
96	2.11.000186	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Data Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
97	2.11.000187	Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan pada tingkat Kabupaten/Kota.	0	0	0	0	0
98	2.11.000190	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	Dokumen	1. Data jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 2. Data jumlah kebijakan yang disusun 3. Data jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan	0	0	0	0	0
99	2.11.000191	Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	0	0	0	0	0
100	2.11.000194	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Data jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	0	0	0	3	0
101	2.11.000196	Jumlah izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	3	3	9	9	9
102	2.11.000199	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	15	7	1	0	0
103	2.11.000202	Jumlah izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	3	3	9	9	9
104	2.11.000203	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	0	0	14	18	13
105	2.11.000204	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Dokumen	Laporan hasil pembinaan terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dll	0	0	0	11	0
106	2.11.000206	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Perkara	Tersedianya data jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	0	0	0	0	0
107	2.11.000210	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	Kegiatan	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
108	2.11.000217	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS	0	0	0	11	0
109	2.11.000219	Jumlah Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	0	0	0	0	0
110	2.11.000222	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen	Laporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).	1	1	1	1	1
111	2.11.000223	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	Dokumen	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0	0	0	0	0
112	2.11.000224	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup	0	1	2	2	2
113	2.11.000229	Jumlah Laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1. tersedianya data jumlah daerah 2. tersedianya data potensi timbunan sampah daerah 3. tersedianya data jumlah/prosentase sampah tidak terkelola di setiap daerah (kabupaten/kota)	0	0	0	0	0
114	2.11.000231	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota	0	0	0	0	0
115	2.11.000233	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan dampak perubahan iklim, penyusunan kajian kerentanan, pilihan aksi, prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi	0	0	0	0	0
116	2.11.000234	Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.	Dokumen	Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi	0	0	0	0	0
117	2.11.000235	Jumlah Laporan pembinaan atas penerapan Rencana Kebijakan Teknis Pengelolaan Sampah Regional	Dokumen	1. jumlah kegiatan pemantauan implementasi/pelaksanaan kebijakan 2. jumlah ritasi pelaksanaan pemantauan untuk setiap implementasi kebijakan per tahun 3. Tersedianya data seluruh kegiatan yang terkait dengan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah regional yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun dibuat secara tertulis/dalam bentuk laporan					
118	2.11.000237	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkait	0	0	0	0	0
119	2.11.000239	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala provinsi eksisting	Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	0	0	0	0	0
120	2.11.000240	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0
121	2.11.000242	Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Lokasi	Wilayah lintas kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah provinsi	0	0	0	0	0
122	2.11.000246	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0
123	2.11.000249	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	Aduan	Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	0	0	0	3	0
124	2.11.000251	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	Tersedianya data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD	0	0	0	6	5
125	2.11.000252	Jumlah PPLHD Eksisting	Orang	Tersedianya data PPLHD yang aktif	0	0	0	6	5
126	2.11.000253	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Tersedianya data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud	0	0	0	0	5
127	2.11.000254	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Tersedianya data kebutuhan PPLHD	0	0	0	0	9
128	2.11.000255	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Jumlah pembentukan dan peningkatan kapasitas penyidik PNS LHK Daerah	0	0	0	0	0
129	2.11.000256	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	Ton		0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
130	2.11.000258	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di provinsi	Unit	Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	0	0	0	0	0
131	2.11.000260	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia	Unit	tersedianya data jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah regional	0	0	0	0	0
132	2.11.000267	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	Tersedianya data jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	0	0	0	0	0
133	2.11.000268	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	0	12	24	24	24
134	2.11.000270	Laporan KLHS kabupaten/kota yang disusun	Dokumen	Tersedianya data: a. pembuatan KLHS meliputi SK Tim, Pengkajian TPB, Perumusan Skenario, Penjaminan Kualitas. b. pelaksanaan KLHS meliputi integrasi ke dalam RAD TPB dan dokumen perencanaan RPJMD	0	0	0	0	0
135	2.11.000272	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha	Wilayah lintas kabupaten/kota yang dilakukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah provinsi	0	0	0	0	0
136	2.11.000279	Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)	Poin	Besaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya	0	0	0	0	0
137	2.11.000281	Tersusunnya dokumen IKLH	Dokumen	Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL	0	0	0	0	0
138	2.11.000282	Tersusunnya dokumen IKPLHD	Dokumen	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah	0	0	0	0	0
139	2.11.000283	Tersusunnya dokumen SLHD	Dokumen	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah	0	0	0	0	0
140	2.11.000284	Volume sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Ton	1. data jumlah timbulan sampah yang di tangani dalam kondisi khusus yang kewenangan provinsi 2. data biaya penanganan sampah dalam kondisi khusus (Rp/ton atau Rp/event atau Rp/unit atau Rp/hari)	0	0	0	0	0
141	2.11.000285	Volume sampah regional yang dikelola	Ton	1. Data biaya penanganan sampah regional /ton 2. Data jumlah/volume sampah regional yang di kelola	0	0	0	0	0
142	2.11.000291	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan		Laporan hasil pembinaan terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan RPPLH dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dll	0	0	0	0	0
143	2.11.000293	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang		Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		diawsi yang telah dilakukan pembinaan dan evaluasi		diawasi yang telah dilakukan pembinaan dan evaluasi					
144	2.11.000294	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan denda akibat tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup		data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan denda akibat tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	0	0	0	0	0
145	2.11.000296	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	0	0	0	0	0
146	2.11.000300	&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	Laporan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan pengembangan NSPK pendukung penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 3. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH	0	0	0	0	0
147	2.11.000305	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0
148	2.11.000312	Data dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi	Dokumen	Data Laporan Induk/Catatan Hasil Asistensi KLHS Kab/Kota yang dilakukan pembinaan serta Berita Acara Verifikasi Integrasi	0	0	0	0	0
149	2.11.000313	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0
150	2.11.000315	Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi	Kabupaten/Kota	Data kabupaten/kota di suatu provinsi yang telah dilaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi (termasuk pelaksanaan bimtek, asistensi, supervisi, validasi hingga verifikasi	0	0	0	0	0
151	2.11.000318	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan		limbah B3 sesuai kewenangannya yang diterbitkan					
152	2.11.000328	Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Dokumen	Tersedianya dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus	0	1	1	0	0
153	2.11.000330	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan menghitung persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan	0	0	0	0	0
154	2.11.000331	sesuai dengan kewenangannya	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0
155	2.11.000335	1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Semua dokumen hasil proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD mulai dari dokumen hasil identifikasi TPB, Rumusan skenario TPB, surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah, BA validasi, dan surat keterangan atau BA verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan daerah	0	0	0	0	0
156	2.11.000336	Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.	0	0	0	0	0
157	2.11.000344	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningkatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan	Orang	Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup	0	0	0	0	0
158	2.11.000346	Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	Sekolah	Data jumlah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	0	0	0	0	0
159	2.11.000347	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak	Sanksi	Data dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum dan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		taat dan menjadi kewenangannya		pengelolaan lingkungan hidup. Data ini mencakup jumlah sanksi administrasi yang dikenakan, jenis sanksi, pelanggaran yang dikenai sanksi, serta status pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.					
160	2.11.000357	Timbulan Sampah Harian	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari.	0	0	0	0	0
161	2.11.000358	Timbulan Sampah Tahunan	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunan	60.098,00	309.951,57	275.377,11	285.931,49	289.883,00

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.12.000007	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen		0	0	0	2	2
2	2.12.000018	Dokumen hasil pemanfaatan data atas Peristiwa Penting	Dokumen		0	0	0	11	0
3	2.12.000019	Dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen		0	0	0	1	0
4	2.12.000038	Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen		0	0	0	11	0
5	2.12.000043	Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	Dokumen		2	2	2	2	2
6	2.12.000045	Dokumen penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Dokumen		1	1	1	1	1
7	2.12.000075	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan		0	0	0	11	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.13.000008	Buku Register Desa	Dokumen	(provinsi) Fasilitas Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan,	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka Pencatatan Data dan informasi serta percepatan Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota)Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada Buku Register Desa					
2	2.13.000009	BUM Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui strategi: a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa d. penguatan kerja sama atau e. penguatan pengelolaan aset dan f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan dan g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.	2	2	2	2	2
3	2.13.000011	Desa yang melakukan pengembangan Inovasi	Desa	Kegiatan dalam rangka mendukung Pelaksanaan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa, meliputi : I. Fasilitasi Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa : 1) Penyusunan Strategi Pengembangan Desa Brprestasi/Inovatif berdasarkan hasil Evaluasi Perkembangan Desa 2) Pengembangan Kapasitas Evaluator pelaksanaan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa 3) Penyusunan Juknis penjarangan Desa/Kelurahan Berprestasi 4) Penjarangan Desa dan Kelurahan Berprestasi (Lomba Desa) II. Fasilitasi Program Pasca Penjarangan Desa Berprestasi (Lomba Desa) 1) Pekan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2) Labsite / Laboratorium Desa Percontohan 3) Peningkatan Kapasitas bagi Desa Kurang Berkembang 4) Evaluasi pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan Desa 5) Publikasi Sukses Story Desa Berprestasi/Inovatif					
4	2.13.000015	Dokumen hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dokumen	Laporan berisi hasil fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan: penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, pelindungan, dan pemasaran.	1	0	0	1	0
5	2.13.000022	Dokumen hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen		0	0	0	0	0
6	2.13.000028	Kapasitas SDM aparatur desa	Orang		77	50	50	60	160
7	2.13.000029	Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak	Dokumen	Adalah Bentuk pembinaan berupa asistensi dan supervisi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis serta penyiapan aplikasi untuk mendorong pengelolaan aset desa secara transparan dan akuntabel Adalah Bentuk pembinaan pengelolaan aset desa berupa penyediaan aplikasi (sipades) termasuk peningkatan kapasitas aparatur daerah dan desa	1	0	0	0	0
8	2.13.000030	Laporan asil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan upaya atau dukungan (pelaksanaan program/kegiatan, bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Tim Penggerak PKK sebagai mitra Pemerintah di setiap jenjangnya dalam rangka menyelenggarakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga melalui 10 Program Pokok PKK 2. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.	10	6	8	8	8
9	2.13.000033	Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Laporan	Gelar TTG adalah salah satu metode pemasyarakatan TTG yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan. Gelar TTG dilakukan melalui kegiatan: a. pameran b.	1	0	0	1	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				lokakarya c. temu inventor/inovator TTG dan/atau d. forum komunikasi e. widyawisata f. dan g. festival/pameran potensi desa.					
10	2.13.000036	Laporan hasil pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Laporan	Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Pindeskel) adalah penyelenggaraan kegiatan untuk mempublikasikan keberhasilan & inovasi yg telah dilakukan oleh Pemda serta pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. kegiata pada pelaksanaan Pindeskel meliputi: 1. Penyusunan Juklak Pindeskel 2. Peningkatan kapasitas pemerintah Desa 3. Pelaksanaan pameran Inovasi Desa 4. Evaluasi Pindeskel	0	0	0	0	0
11	2.13.000040	Laporan pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Laporan	Gelar TTG adalah salah satu metode pemasyarakatan TTG yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan. Gelar TTG dilakukan melalui kegiatan: a. pameran b. lokakarya c. temu inventor/inovator TTG dan/atau d. forum komunikasi e. widyawisata f. dan g. festival/pameran potensi desa.	1	0	0	1	0
12	2.13.000057	Partisipasi masyarakat Desa	Desa	Partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan adalah dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa. Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan dan pengawasan desa adalah untuk mengendalikan kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu: a. kepala b. perangkat c. kelompok kerja Pendataan d. tim penyusun RPJM e. tim penyusunan RKP f. panitia pengadaan barang dan jasa di dan g. tim Pelaksana Kegiatan Dalam hal masyarakat Desa menemukan adanya kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat Desa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BPD dan/atau menyampaikan aspirasi secara tidak langsung melalui kotak pengaduan.	3	2	3	0	0
13	2.13.000058	Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa,	Peraturan Desa	1. Jenis Produk Hukum Desa terbagi menjadi 3: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ; 2. Fasilitasi yang dilaksanakan adalah berupa Penguatan Penyusunan Produk Hukum Desa, Bimbingan Teknis penyusunan Produk	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Hukum Desa dan Pendataan produk Hukum Desa					
14	2.13.000061	Pendapatan asli Desa, alokasi dana desa	Dokumen	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam bentuk: 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 3. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. Khusus perihal PADes dan ADD Subdit saat ini melalui aplikasi konsolidasi keuangan desa mewadahi tempat pelaporan keuangan desa smt 1 dan akhir th guna melihat data PADes serta ADD ini	0	1	0	0	0
15	2.13.000062	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Laporan	Laporan berisi hasil fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan: penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, pelindungan, dan pemasaran.	0	0	0	0	0
16	2.13.000063	Penyelenggaraan musyawarah desa	Dokumen	Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.	1	1	1	0	0
17	2.13.000064	Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa	Peraturan Kepala Desa	(provinsi) Kerja Sama Desa dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (kab/Kota) Kesepakatan bersama antar-Desa yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. kerja	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				sama antar Desa dilakukan antara : a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) dan b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.					
18	2.13.000067	Prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa	Dokumen		2	0	0	0	0
19	2.13.000068	Pranata hukum adat	Dokumen	Pendataan SK MHA	0	0	0	0	0
20	2.13.000069	Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain	Lembaga Desa dan Desa Adat	penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan NSPK, Monev dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi terhadap LKD & LAD serta MHA di Desa dan Desa Adat	2	1	1	0	2
21	2.13.000071	SDM anggota BPD	Orang	(provinsi) Meningkatkan sikap dan keterampilan anggota BPD melalui Bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan (Kab/Kota) Memberikan penghargaan atas prestasi dan kinerja anggota BPD oleh pemerintah daerah	186	60	80	0	0
22	2.13.000073	Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Dokumen	(provinsi) Fasilitas Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. (kab/kota) 1. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa merujuk pada keseluruhan tahapan yang terkait dengan pemilihan kepala desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.	5	0	3	0	0
23	2.13.000074	Tingkat perkembangan desa	Desa	Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun yang diklasifikasikan dalam 5 status Desa yakni: a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra- c. Desa Berkembang, atau	323	309	206	240	206

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				bisa disebut sebagai Desa d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-dan e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.					
24	2.13.000076	Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan	0	0	0	0	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.14.000005	Daerah Provinsi yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Laporan		0	0	0	5	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.15.000305	Grosse Akta Kapal	Dokumen		6	5	7	3	2
2	2.15.000307	Surat Ukur Kapal yang masih berlaku	Dokumen		6	5	7	3	2
3	2.15.000308	Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku	Dokumen		6	5	7	3	2

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.16.000075	Data dan informasi dibagipakaikan	Data	Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain	0	0	1	1	1
2	2.16.000091	Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Titik	Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain.	0	0	0	0	1
3	2.16.000114	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	Aduan	Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai	20	37	7	12	26

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara					
4	2.16.000115	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	Aduan	Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	0	0	0	6	8
5	2.16.000124	Konten Foto	Konten Digital	Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Foto adalah konten hasil tangkapan kamera	0	145	247	225	367
6	2.16.000125	Konten Teks	Konten	Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya	23	51	131	162	149
7	2.16.000126	Konten Grafis	Konten	Perhitungan Jumlah konten grafis - Konten Grafis adalah konten berupa karya visual	0	64	349	181	127
8	2.16.000127	Konten Audio Video	Konten	- Perhitungan Jumlah konten audio video - Konten Audio Video adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginkan	0	459	1173	1022	621
9	2.16.000130	Pertemuan tatap muka	Kegiatan	Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka - Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum)	0	0	0	2	1
10	2.16.000133	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan	Perhitungan Jumlah diseminasi melalui shared media - Shared media adalah media tidak berbayar , termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dll	0	0	2024	484	1277
11	2.16.000134	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah - Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah	0	5	5	33	5
12	2.16.000138	Saluran TV yang dikelola pemda	Saluran	Perhitungan Jumlah Saluran TV yang dikelola pemda	0	1	0	0	0
13	2.16.000140	Radio milik Pemerintah Daerah	Radio	Perhitungan jumlah Radio milik Pemerintah Daerah	0	0	1	1	1
14	2.16.000142	Media Online yang dikelola oleh Pemda	Media	Perhitungan jumlah Media Online yang dikelola oleh Pemda	0	0	4	4	4
15	2.16.000143	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda		Perhitungan jumlah akun media sosial di seluruh Perangkat Daerah Pemda	0	0	6	6	10
16	2.16.000144	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers	Jumlah Siaran Pers yang dibuat - Siaran pers merupakan ulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.	0	0	0	70	177
17	2.16.000145	Siaran pers yang dimuat di media	Siaran Pers	Jumlah Siaran pers yang dimuat di media	0	0	0	70	177
18	2.16.000148	Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan	0	4	9	6	8

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.					
19	2.16.000149	Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	Perhitungan Jumlah Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasi berkala adalah nformasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali	0	0	0	50	51
20	2.16.000150	Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	Perhitungan Jumlah Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasiserta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.	0	0	0	19	19
21	2.16.000151	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	0	0	0	32	32
22	2.16.000152	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang Bidang komunikasi publik	0	0	0	1	1
23	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP	0	0	0	0	0
24	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP	0	0	0	0	0
25	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP	0	0	0	0	0
26	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP	0	0	0	0	0
27	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP	0	0	0	0	0
28	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP	0	0	0	0	0
29	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP	0	0	0	0	0
30	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP	0	0	0	0	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.17.000002	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Dokumen	Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.	0	0	0	0	7
2	2.17.000003	Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Dokumen	Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.	0	0	1	1	1
3	2.17.000004	Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk Jaringan Pelayanan.	0	0	0	0	0
4	2.17.000006	Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk jenis Jaringan Pelayanan	0	0	0	0	0
5	2.17.000011	Koperasi usaha simpan pinjam	Unit Usaha	Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.	141	141	142	143	145
6	2.17.000012	Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Unit Usaha	Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.	2.218	2.276	2.331	2.401	2.464
7	2.17.000013	Koperasi hasil pengukuran tingkat kesehatan	Unit Usaha	Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah.	0	0	0	0	0
8	2.17.000014	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah.					
9	2.17.000015	Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Unit Usaha	Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.	0	0	0	0	0
10	2.17.000016	Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Unit Usaha	Jati diri Koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, seperti dikehendaki oleh anggota dan masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi.	0	0	0	0	0
11	2.17.000017	Koperasi Yang Diberikan penilaian manajemen	Unit Usaha	Penilaian Manajemen adalah salah satu aspek penilaian kesehatan sebagai bahan evaluasi agar koperasi mampu meningkatkan performanya.	0	0	0	0	0
12	2.17.000018	Koperasi Yang Diberikan penilaian permodalan	Unit Usaha	Penilaian Permodalan adalah salah satu aspek penilaian kesehatan sebagai bahan evaluasi agar koperasi mampu meningkatkan performanya.	0	0	0	0	0
13	2.17.000019	Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	Unit Usaha	Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.	0	0	0	0	0
14	2.17.000025	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0	0	0	0	0
15	2.17.000026	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0	0	0	0	0
16	2.17.000028	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.	0	0	0	0	0
17	2.17.000029	Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.	0	0	0	0	0
18	2.17.000031	Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.	0	0	0	0	0
19	2.17.000039	Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rmemenuhi kriteria Usaha Mikro.	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
20	2.17.000040	Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rmemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.	0	0	16	40	12
21	2.17.000041	Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rmemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.	0	0	0	0	0
22	2.17.000042	Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan	Unit Usaha	Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain. Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.	0	13	0	5	187
23	2.17.000043	Unit Usaha yang memenuhi restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.	0	0	0	0	0
24	2.17.000044	Unit Usaha yang memenuhi standarisasi	Unit Usaha	Standarisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis	0	0	0	0	269

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu.					
25	2.17.000046	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.	0	0	0	0	388
26	2.17.000047	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar	Unit Usaha	Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain.	0	0	0	0	118
27	2.17.000048	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Standardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu.	0	0	0	0	0
28	2.17.000049	Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha	Unit Usaha	Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.	0	0	0	0	0
29	2.17.000051	Unit Usaha Yang produktif	Unit Usaha	Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu.	0	0	120	100	90
30	2.17.000052	Unit Usaha Yang produktif, bernilai Tambah	Unit Usaha	Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Nilai tambah adalah suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.	0	0	120	100	90
31	2.17.000053	Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha besar.	0	0	0	0	13

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	0	0	1	1	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
2	2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.	Dokumen	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	0	0	1	1	0
3	2.18.000006	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	0	0	1	1	0
4	2.18.000007	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	0	0	0	0	0
5	2.18.000008	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Non Perizinan.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	0	0	0	0	0
6	2.18.000012	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Perizinan;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	0	0	0	4	1
7	2.18.000015	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Sistem Elektronik.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	0	0	463	705	721
8	2.18.000019	Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.	Dokumen	Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi	1	0	0	0	0
9	2.18.000022	Peraturan daerah/Provinsi tentang Pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;	Dokumen	Jumlah peraturan Daerah/Provinsi terkait Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	0	0	0	0	0
10	2.18.000023	Peraturan daerah/Provinsi tentang Pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	0	0	0	0	0
11	2.18.000024	Peraturan daerah/Provinsi tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.	Dokumen	&Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan&	0	0	0	0	0
12	2.18.000025	Peraturan daerah/provinsi tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif.	Dokumen	&Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan&	0	0	0	0	0
13	2.18.000027	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
14	2.18.000029	Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen	Peta Potensi Investasi Provinsi adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah Provinsi yang mempunyai nilai ekonomi Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	0	0	0	0	0
15	2.18.000030	Rencana Minat Investasi di dalam negeri;	Dokumen	Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	0	0	0	0	0
16	2.18.000032	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.	0	15	14	35	43
17	2.18.000036	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.	0	0	0	0	0
18	2.18.000037	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Kemudahan Berusaha adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.	0	0	0	0	0
19	2.18.000043	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara pelaku UMKM dengan usaha besar	0	0	0	1	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.19.000064	Pemuda Kader	Orang	Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan	63	50	37	31	38
2	2.19.000065	Pemuda Pelopor	Orang	Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan	3	2	2	4	1
3	2.19.000068	Pemuda Berprestasi	Orang	Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan	1	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
4	2.19.000069	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	450	451	460	460	688
5	2.19.000070	Sarana dan Prasarana kepemudaan	Unit	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang tersedia di daerah	4	4	4	4	4
6	2.19.000071	Organisasi Kepemudaan berprestasi	Organisasi	Stake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada aspek pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan	0	0	0	0	0
7	2.19.000073	Atlet/olahragawan talenta muda	Orang	Tersedianya atlet/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP/PPLPD/SKO/induk cabor pengprov/pengkot/kab dan klub olahraga dan usia &18 tahun pada PPLM/PPLD, induk cabor, dan klub olahraga	96	91	84	84	77
8	2.19.000075	Atlet/olahragawan disabilitas	Orang	Tersediannya atlet/olahrawagan disabilitas daerah yang mendapatkan pembinaan melalui NPCI Kabupaten/Kota/Provinsi	0	0	35	35	39
9	2.19.000076	Kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab/Kota) dan tingkat menengah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)	2	0	0	1	0
10	2.19.000078	kompetisi/kejuaraan single event		Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga (Kejurkot/kejuaraan antar klub/kejurda) pada cabang olahraga tertentu di daerah	2	0	0	1	5
11	2.19.000079	Kompetisi/kejuaraan multi event	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga / Pekan olahraga Daerah pada berbagai cabang olahraga (PORDA)	0	0	0	1	1
12	2.19.000080	Kompetisi/kejuaraan paralimpik	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan paralimpik di tingkat provinsi (PERPARPROV)	0	0	0	0	0
13	2.19.000081	Pelatih olahraga yang bersertifikat	Orang	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	62	30	55	40	95
14	2.19.000082	Organisasi Olahraga	Lembaga	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	19	19	19	19	19
15	2.19.000084	Sentra pembinaan Olahraga	Lembaga	Tersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi/Kab/Kota	1	1	1	1	1
16	2.19.000085	Sarana Olahraga	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	288	288	211	211	211
17	2.19.000086	Prasarana Olahraga	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	87	87	87	90	93
18	2.19.000087	Sarana Olahraga Disabilitas	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
19	2.19.000088	Prasarana olahraga disabilitas	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
20	2.19.000089	Organisasi Kepramukaan	Organisasi	Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi,	12	12	12	12	12

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				aspirasi, dan agama yang terbentuk di daerah					
21	2.19.000091	Kegiatan pramuka	Orang	Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang melibatkan peserta didik kepramukaan	941	114	431	387	300

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.20.000019	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.	0	0	0	110	116
2	2.20.000020	Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data		Jumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data	0	0	0	110	116
3	2.20.000021	Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi		Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi adalah jumlah indikator statistik statistik sektoral yang menggunakan kode referensi yang sudah disepakati. Kode referensi adalah kode yang dibahas dan disepakati dalam forum satu data indonesia tingkat pusat.	0	0	0	260	218
4	2.20.000022	Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil	Dokumen	Analisis kebutuhan data adalah proses identifikasi output statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dibutuhkan. Konfirmasi hasil adalah proses konfirmasi output statistik yang telah dihasilkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna data.	0	0	0	0	0
5	2.20.000023	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dimasukkan kedalam penghitungan adalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada pengguna data.	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
6	2.20.000024	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik.	0	0	0	0	0
7	2.20.000025	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	0	0	132	70	120
8	2.20.000026	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	0	0	0	0	0
9	2.20.000028	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD.	0	100	100	100	100
10	2.20.000030	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan	Jumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data.	0	0	2	1	2
11	2.20.000031	Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data	Laporan	Jumlah Laporan sosialisasi yang dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk meningkatkan literasi/pemahaman data statistik pengguna data.	0	0	0	0	0
12	2.20.000050	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD	0	0	0	110	116
13	2.20.000051	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi	0	0	0	110	116
14	2.20.000052	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen.	0	0	0	76.53	99.54
15	2.20.000053	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data/indikator dari kegiatan statistik tersebut) dapat diakses/tersedia di portal data pemda	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
16	2.20.000054	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda	Persentase	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda adalah persentase pengguna data mengakses portal data pemda yang merasa puas dibandingkan dengan jumlah total pengguna data yang mengakses portal data pemda	0	0	0	0	0
17	2.20.000055	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda dibagi dengan total jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemda/OPD dikalikan 100 persen	0	0	0	0	0
18	2.20.000056	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan kegiatan statistik yang berisikan rancangan setiap tahapan penyelenggaraan statistik, diantaranya mencakup spesifikasi kebutuhan data, rancangan metodologi, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi.	0	0	0	0	0
19	2.20.000057	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persentase	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah dikali 100 persen.	0	0	0	0	0
20	2.20.000058	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen	0	0	0	0	0
21	2.20.000059	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi resmi dari BPS	0	0	0	0	0
22	2.20.000060	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah	Kegiatan	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah adalah jumlah penyelenggaraan wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintah Daerah dan/atau Internal Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun	0	0	0	0	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.21.000001	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	0	0	0	1	0
2	2.21.000002	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	0	1	1	1	2
3	2.21.000003	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	Jumlah Laporan penjabaran informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	0	0	0
4	2.21.000004	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan.	0	0	1	1	0
5	2.21.000005	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Non Elektronik	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi berbasis non elektronik dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik	0	0	0	0	0
6	2.21.000006	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada Pemerintah Daerah Provinsi	1	6	8	4	0
7	2.21.000007	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	3	2	0	0	3
8	2.21.000008	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	0	0	0	2	44

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.22.000007	Cagar Budaya yang dipelihara	Unit		10	10	10	10	5
2	2.22.000107	Objek Cagar Budaya yang dikelola	Objek		94	94	94	94	94

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.23.000054	Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi yang berada diwilayah provinsi	12	12	12	12	12
2	2.23.000055	Perpustakaan Khusus kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga	23	23	22	22	23

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain yang berada di wilayah provinsi					
3	2.23.000056	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem informasi perpustakaan terintegrasi (Inlislite, SLims, atau sejenisnya)	1	2	2	2	3
4	2.23.000057	Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan provinsi	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang memiliki sarana penyimpanan dan pelayanan bahan pustaka digital (Cth. EPrints, DSpace, OJS, aplikasi mobile perpustakaan dan sejenisnya)	1	2	2	3	3
5	2.23.000058	Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah menengah sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan yang berada di wilayah Provinsi	409	412	415	423	425
6	2.23.000059	Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (pasal 32 ayat (1) UU No. 20 Tahun 20023 tentang Sisdiknas). Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan khusus yang berada di wilayah provinsi.	14	16	16	16	16
7	2.23.000060	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Rata-Rata kunjungan masyarakat/pemustaka ke perpustakaan umum per hari di wilayah provinsi baik secara onsite maupun online	21323	15482	16250	15310	16232
8	2.23.000061	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Rata-rata kunjungan karyawan/pegawai per hari di perpustakaan khusus di wilayah Provinsi baik secara onsite maupun online	11500	7360	7865	11786	12124
9	2.23.000062	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah binaan Provinsi	Orang	rata-rata kunjungan civitas sekolah (siswa, guru , tenaga pendidikan) per hari di perpustakaan sekolah menengah (SMA/sederajat) di wilayah Provinsi baik secara onsite maupun online	409000	198302	498000	507600	510000
10	2.23.000063	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus binaan Provinsi	Orang	rata-rata kunjungan civitas sekolah (siswa, guru , tenaga pendidikan) perhari di perpustakaan satuan pendidikan khusus baik secara online maupun secara onsite	11760	5886	23040	23125	32236
11	2.23.000068	Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima oleh perpustakaan milik provinsi	Eksemplar	Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk	176	219	50	114	37

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit. Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima oleh perpustakaan di wilayah provinsi					
12	2.23.000069	Penerbit dan Produsen Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)	Penerbit/produsen	Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam yang berada di wilayah Propinsi	0	0	0	0	0
13	2.23.000070	Jumlah Koleksi hasil pelaksanaan KCKR yang diolah	Eksemplar	Kegiatan pengolahan meliputi verifikasi, entry data (deskripsi Bibliografis, nomor klasifikasi,subjek, abstrak), upload cover, memasang RFID, tagging dan label. Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah koleksi hasil serah simpan KCKR di wilayah provinsi yang sudah diolah	170	200	50	100	37
14	2.23.000077	Jumlah promosi gemar membaca tingkat provinsi	kegitan	Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kegiatan promosi kegemaran membaca di wilayah provinsi yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Provinsi	18	10	24	97	28
15	2.23.000078	Tenaga Teknis Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Umum di wilayah Provinsi (tidak termasuk pustakawan)	68	70	22	24	25
16	2.23.000079	Tenaga Teknis Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Khusus di wilayah Provinsi (tidak termasuk pustakawan)	33	34	33	34	36
17	2.23.000080	Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Menengah binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di	459	462	465	473	478

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Perpustakaan satuan pendidikan menengah (SMA/SMK/ sederajat) di wilayah Provinsi (tidak termasuk pustakawan)					
18	2.23.000081	Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Khusus binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan satuan pendidikan khusus yang berada diwilayah provinsi (tidak termasuk pustakawan)	35	36	34	36	37
19	2.23.000082	Pustakawan Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum di wilayah provinsi	23	23	52	52	48
20	2.23.000083	Pustakawan Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Khusus di wilayah provinsi	2	2	3	3	3
21	2.23.000084	Pustakawan Perpustakaan satuan pendidikan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan menengah di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Khusus di wilayah provinsi	3	3	3	3	3
22	2.23.000086	Anggota perpustakaan umum binaan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah provinsi	3300	2301	2465	2536	2640
23	2.23.000087	Anggota perpustakaan khusus binaan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan khusus yang berada di wilayah provinsi	237	241	246	242	230
24	2.23.000088	Anggota perpustakaan sekolah menengah binaan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan pendidikan menengah (SMA /SMK/ Sederajat) yang berada di wilayah provinsi	5725	5300	7650	8208	8500
25	2.23.000089	Anggota perpustakaan satuan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan pendidikan khusus yang berada di wilayah provinsi	1425	1136	1175	1185	1185
26	2.23.000090	Siswa sekolah menengah dan khusus yang terlibat dalam	Orang	Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca	12	8	8	10	14

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		promosi gemar membaca tingkat provinsi		peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan. Jumlah Siswa sekolah menengah dan khusus yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi					
27	2.23.000091	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	Orang	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	13	14	8	8	12

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	2.24.000001	Arsip Statis yang dilakukan Akusisi,Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip		0	0	0	36	384

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	3.25.000128	Luasan kawasan konservasi yang dicadangkan	Ha	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola merupakan Jumlah besaran area pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang digunakan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang dicadangkan	131.246,74	913.125	943.631	371.836,61	57.594,12
2	3.25.000185	Personel Pengawas Perikanan	Orang	Jumlah personel Polisi Khusus Wilayah Pesisir Pulau - Pulau Kecil (Polsus PWP3K)	0	0	0	1	1
3	3.25.000190	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Jumlah produksi ikan hasil tangkapan nelayan baik didaratkan dipelabuhan maupun di non pelabuhan.	557.530	523261	547.462	518.614	513.482
4	3.25.000193	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi (10 GT Sampai dengan 30 GT)	1	1	2	2	2
5	3.25.000196	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi buku kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi (Sampai dengan 10 GT)	1	1	2	2	2
6	3.25.000198	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi	1	1	2	2	2
7	3.25.000199	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan sampai dengan	1	1	2	2	2

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				10 GT yang menjadi kewenangan Provinsi					
8	3.25.000261	Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan	Jumlah Peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Provinsi	2	4	4	4	4
9	3.25.000263	Kapal di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Unit	&Jumlah kapal penangkap ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang memiliki izin sesuai dengan kewenangan Provinsi&	429	1162	651	474	506
10	3.25.000265	Kelompok masyarakat Pengawas yang melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha kelautan dan perikanan	Kelompok	Kelompok masyarakat pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, masyarakat petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan Penumbuhan Pokmaswas dilakukan atas prakarsa masyarakat sendiri sedangkan pengembangan Pokmaswas dapat difasilitasi oleh Pemda. Selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan yang ditetapkan oleh Pusat	76	76	90	103	113
11	3.25.000270	Unit kapal yang aktif (Memiliki Izin yang masih berlaku)	Unit	Jumlah kapal penangkap ikan yang memiliki izin yang masih aktif sesuai dengan kewenangan Provinsi	429	1162	651	474	506
12	3.25.000277	Poduksi benih Ikan Laut	Ekor	Produksi benih ikan laut hasil budidaya	1.196.000	2.733.000	2.064.000	1.355.000	1.009.000
13	3.25.000305	Program dan kegiatan terkait pelabuhan perikanan	Program/Kegiatan	Program dan kegiatan terkait pelabuhan perikanan yang dianggarkan melalui APBD	1	1	1	1	1
14	3.25.000328	Personel Pengawas Perikanan	Orang	Jumlah personel Pengawas Perikanan	24	24	23	58	57
15	3.25.000346	Lahan pembudidayaan ikan	Ha	Jumlah lahan pembudidayaan ikan dalam Hektar	0,07	0.18	0,36	0,53	0,075
16	3.25.000365	Produksi Benih	Ekor	Produksi benih ikan air payau dan air tawar yang digunakan untuk usaha budidaya air payau dan air tawar	56	218.000	444.000	189.000	207.000
17	3.25.000378	Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.	17	17	13	23	25
18	3.25.000380	Pelaku Usaha yang diberikan Pemantauan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Pemantauan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.	17	17	13	23	25

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
19	3.25.000396	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tersedia dan terbentuk	Orang	1) SDM Pengawasan SDKP terdiri dari Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Pengelollan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Polsus PWP3K) dan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Perikanan. 2) Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan meliputi: a. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/ b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat dan c. sehat jasmani dan rohani 3) Polsus PWP3K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K meliputi: a. pegawai negeri sipil yang membidangi pengawasan PWP3K sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya, dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b dengan pendidikan paling rendah setingkat dan b.telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan. 4) PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS Perikanan meliputi: a. pegawai negeri sipil masa kerja paling singkat 2 tahun b. pangkat paling rendah Penata Muda/golongan III.a c. pendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum e. sehat jasmani dan rohani f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan	24	24	23	58	57
20	3.25.004124	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	252	159	173	212	107

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
21	3.25.004125	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang masuk	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang masuk	252	159	173	212	107
22	3.25.004126	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diproses	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diproses	252	159	173	212	107
23	3.25.004138	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	1	1	1	2	2
24	3.25.004142	UPT Pengelola	Unit	SK KDH Penetapan UPT Pengelola	2	2	2	2	2
25	3.25.004187	Kegiatan layanan dan aktifitas kepelabuhanan perikanan	Kegiatan	Jumlah kegiatan layanan dan aktifitas kepelabuhanan perikanan	2	2	2	2	2

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	3.26.000011	Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengembangan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberi nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum	0	1	1	1	1
2	3.26.000012	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen		0	1	1	1	1
3	3.26.000018	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi untuk memperoleh data dan informasi tentang pertumbuhan sektor pariwisata Provinsi	0	1	1	1	1
4	3.26.000025	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Luar Negeri	Dokumen	Mengidentifikasi awareness tourist asing terkait Destinasi Pariwisata Daerah (yang berada di bawah naungan provinsi)	0	1	1	1	1
5	3.26.000028	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Dalam Negeri	Dokumen	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan lokal	0	1	1	1	1
6	3.26.000033	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	0	5	5	5	5
7	3.26.000034	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri	Dokumen	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	0	5	5	5	5
8	3.26.000035	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan	0	5	5	5	5

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				melalui media luar ruang dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang					
9	3.26.000050	Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen		1	0	0	0	0
10	3.26.000053	Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Kawasan		0	0	0	0	0
11	3.26.000064	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Jaringan Orang Kreatif	Laporan		1	0	0	0	0
12	3.26.000115	Pengunjung objek daya tarik wisata provinsi	Orang		0	0	0	0	0
13	3.26.000118	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Dokumen		2	2	2	2	2
14	3.26.000121	Retribusi pariwisata yang dikelola provinsi	Rupiah		0	0	0	0	0
15	3.26.000142	Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Sertifikasi	Unit Usaha		0	0	0	0	0
16	3.26.000160	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Dokumen	Melaksanakan asesmen dan penilaian terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Provinsi	0	0	0	0	0
17	3.26.000165	Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	Data	Data Pelaku Usaha yang telah Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	0	0	0	0	0
18	3.26.000168	Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	melakukan pendataan terkait transaksi potensial yang merupakan hasil dari pemasaran	0	6	6	6	6
19	3.26.000175	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan	&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&	0	0	0	0	0
20	3.26.000179	Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	Mengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Provinsi untuk selanjutnya ditetapkan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah					
21	3.26.000180	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan ekosistem Kabupaten/Kota Kreatif	0	5	5	5	5
22	3.26.000181	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata	Unit	mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata	0	8	8	8	8
23	3.26.000183	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	Unit	mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	0	8	8	8	8
24	3.26.000184	Kaawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan	Kawasan	Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab/kota terhadap perwilayahan kab/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab/kota melalui SK pimpinan daerah	0	1	1	1	1
25	3.26.000194	Data Kondisi SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	0	0	0	0	0
26	3.26.000197	Destinasi Pariwisata Provinsi yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi	Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Provinsi, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan	0	0	0	0	0
27	3.26.000198	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan	Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2.	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataaan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataaan					
28	3.26.000200	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara	Unit	Mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	0	8	8	8	8
29	3.26.000203	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata Provins	Unit	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0	0	0	0	0
30	3.26.000223	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	0	0	0	0	0
31	3.26.000224	Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi yang telah dilakukan	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	0	0	0	0	0
32	3.26.000229	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30	35	35	35	35
33	3.26.000230	Data kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif yang telah dilaksanakan	Orang	Melaksanakan Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30	35	35	35	35
34	3.26.000232	Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	0	0	0	0	0
35	3.26.000233	Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	0	0	0	0	0
36	3.26.000257	Data Pelaku Usaha Ekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	Orang	Data Pelaku Usaha yang telah Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	10	0	0	0	0
37	3.26.000271	Pendukungn Pemasaran Ekonomi Kreatif	Promosi	Kegiatan pendukungn pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya yang berbasis kekayaan intelektual, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019	0	0	0	0	0
38	3.26.000272	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Orang	Kegiatan fasilitasi kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif dalam bentuk	10	20	20	20	20

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				pemberian konsultasi kekayaan intelektual					
39	3.26.000288	Kegiatan / event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	Dokumen	Terpublikasinya kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	2	2	2	2	2
40	3.26.000289	Komersialisasi Produk Kekayaan Intelektual	Produk	Kegiatan Fasilitasi Komersialisasi KI bertujuan agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki KI mendapatkan nilai tambah dari KI tersebut. Dengan demikian, jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah memiliki sertifikat HKI akan mendapat manfaat dari komersialisasi KI. Fasilitasi Komersialisasi KI bertujuan untuk mendorong Inovasi dan Kreatifitas di kalangan pelaku industri ekonomi kreatif, Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif, Pembentukan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan, Promosi Kreativitas Lokal, dan Penyediaan Akses Keuangan	0	20	20	20	20

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	3.28.000001	Bangunan sipil teknis yang Terbangun, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Unit	Jumlah bangunan berupa dam pengendali, dam penahan, gully plug, teras, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, parit buntu (rorak), atau bangunan pelindung tebing sungai/waduk/ danau untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis	31	30	257	300	75
2	3.28.000005	Data Luas area mangrove yang dilaksanakan rehabilitasi, Bibit Mangrove yang disiapkan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Luas Kawasan mangrove yang dilakukan rehabilitasi di luar kawasan hutan berupa kegiatan penanaman, pemeliharaan dan kegiatan pendukungnya meliputi prakondisi, penyusunan rancangan teknis, pendampingan, pengawasan dan penilaian, serta monitoring dan evaluasi	10	0	12	0	0
3	3.28.000010	Data Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara termasuk kegiatan penanaman vegetatif, pemeliharaan serta kegiatan pendukungnya	182	19	93	241	358
4	3.28.000012	Data Luas kawasan yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial	Ha	Pelaksanaan prakondisi kawasan perhutanan sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan) meliputi sosialisasi tingkat tapak, pencermatan PIAPS, fasilitasi usulan dan monitoring termasuk penyelesaian	4.955	4.503	8.263	9.936	36.089

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				konflik tenurial dalam kerangka perhutanan sosial					
5	3.28.000013	Data Luas lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Kegiatan penanaman di luar kawasan hutan termasuk Proyek Strategis Nasional/PSN pada greenbelt atau sekitar danau untuk kegiatan penanaman di fasilitas sosial/umum selain di hutan rakyat dan hutan kota	435	176,2	186,13	355,62	364,24
6	3.28.000015	Dokumen analisis dalam rangka pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Penyediaan layanan dokumen analisis dalam rangka pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan satuan jumlah dokumen	2	0	1	12	9
7	3.28.000017	Dokumen data dan informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi	Dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi yang memuat luas	14	14	14	14	14
8	3.28.000019	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	0	0	0	0	0
9	3.28.000022	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi, Data luas ruang kehutanan	Dokumen	Pelaksanaan kegiatan rapat dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi terhadap usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi.	0	0	0	2	4
10	3.28.000027	Dokumen Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan, Data Luas Kawasan Hutan dalam satu Provinsi	Dokumen	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan seperti RPHJP	0	0	0	0	0
11	3.28.000036	Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi	Dokumen	Melakukan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap RKUPH dan RKTPH	14	14	14	14	14
12	3.28.000040	Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan, Unit KPH	Dokumen	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan seperti RPHJP	8	10	10	11	12
13	3.28.000042	Dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan (RtnRL), Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Dokumen	Penyusunan dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan	0	0	0	0	1
14	3.28.000044	Dokumen tata kelola pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak, DAS Yang dioptimalkan, Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS/Sub DAS,	Kasus	Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka optimalisasi penggunaan lahan sesuai fungsi dan daya dukung wilayah DAS	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		kabupaten/kota yang menerapkan teknik Konservasi Tanah dan Air secara terintegrasi, Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi							
15	3.28.000047	Kegiatan pencegahan kerusakan hasil hutan, Kegiatan pembatasan kerusakan hasil hutan, Klasifikasi hasil hutan	Kasus	Pelaksanaan pencegahan dan pengamanan kerusakan hasil hutan (ilegal logging dan perburuan liar)	0	0	0	0	0
16	3.28.000055	Kelompok tani hutan, Data Luas Perhutanan Sosial dalam satu Provinsi	Kelompok	Melaksanakan penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan menuju KTH mandiri dan Kelompok Perhutanan Sosial melalui pemantapan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha	12	21	11	27	20
17	3.28.000058	Laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultansi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHBK skala Kecil dan Menengah, izin PBPHH Bukan Kayu skala kecil dan menengah	Laporan	Fasilitasi sosialisasi, konsultansi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHH skala Kecil dan Menengah	0	0	0	0	0
18	3.28.000059	Laporan kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu hayati, alat pengolah bahan baku hasil hutan bukan kayu	Kasus	Pelaksanaan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan Menengah berikut pelaksanaan pengenaan sanksi administratif (jika ada)	0	0	0	0	0
19	3.28.000061	Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Kasus	Melakukan Kegiatan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	0	0	0	0	0
20	3.28.000062	Laporan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perlindungan hutan, sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan dan perlindungan hutan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT	Kasus	Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan perlindungan hutan dalam rangka penyelesaian Kasus Pidana (P-21) dan Perdata bidang Kehutanan	0	0	0	0	0
21	3.28.000067	Penyuluh kehutanan, kegiatan, SDM bidang Kehutanan, Modul Peningkatan Kapasitas dan kompetensi bidang kehutanan	penyuluh	Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan (Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan Penyuluh Kehutanan Swasta, Polisi Kehutanan, Manggala Agni, MMP, MPA)	15	15	15	15	17
22	3.28.000077	Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian blok, dan Dokumen Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan pada Wilayah KPHP/L terkait dengan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang)	Unit	Menyusun Dokumen Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan pada wilayah KPHP/L terkait dengan RPHJP	8	10	10	11	12
23	3.28.000078	Unit konservasi tanah dan air Wilayah DAS untuk pengendalian kerusakan lingkungan dan lahan, izin	Unit	Jumlah bangunan berupa dam pengendali, dam penahan, gully plug, teras, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, parit buntu (rorak),	31	30	257	300	75

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		penerapan teknik konservasi DAS, Bangunan Sipil Teknis, terbagunnya bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully plug di Wilayah DAS		atau bangunan pelindung tebing sungai/waduk/ danau untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis					
24	3.28.000079	Unit managemen PBPH HHBK skala Kecil dan menengah beroperasi, laporan kegiatan fasilitasi pendampingan terhadap PBPHH HHBK skala Kecil dan Menengah, Luas pembudidayaan hasil hutan bukan kayu	Unit	Fasilitasi pendampingan terhadap PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan Menengah untuk meperoleh pasokan bahan baku dan akses Pasar.	0	0	0	0	0
25	3.28.000080	Unit managemen PBPHH HHBK skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH, laporan kegiatan fasilitasi permohonan hak akses SI-RPBBPHH untuk PBPHH HHBK skala Kecil dan menengah, laporan pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu	Unit	Memfasilitasi permohonan hak akses SI-RPBBPHH untuk PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah kepada Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	3.29.000038	Data Wilayah yang Belum Teraliri Listrik	Dokumen	Dokumen Jumlah Wilayah yang Belum Teraliri Listrik.	1	1	1	1	1
2	3.29.000043	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Unit	Penghasil listrik yang bersumber dari Tenaga Sinar matahari (surya)	4988 (KESDM)	606 (KESDM)	700 (KESDM) 100 (DESDM)	4 (KESDM) 274 (DESDM)	2 (KESDM) 83 (DESDM)

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	3.30.000003	Bahan berbahaya yang telah dilaporkan pengawasan, distribusi, pengemasan dan pelabelan	Bahan Berbahaya		2	2	2	2	2
2	3.30.000004	Barang Beredar yang diawasi	Barang		429	46	141	323	236
3	3.30.000008	Barang yang telah diuji	Barang		9	0	3	3	2
4	3.30.000009	Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen		4	4	7	17	22
5	3.30.000016	Jasa yang diawasi	Jasa		0	0	4	6	3
6	3.30.000017	Kalibrasi yang telah diterbitkan sertifikasinya	Kalibrasi		0	0	0	0	0
7	3.30.000018	Kegiatan Distribusi yang telah diperiksa	Kegiatan		4	0	4	0	1
8	3.30.000027	Kegiatan Perdagangan yang diawasi	Kegiatan		15	0	11	9	5
9	3.30.000030	Laporan BPSK yang aktif	Laporan		0	0	0	0	1
10	3.30.000031	Laporan kasus yang ditangani	Laporan		3	4	2	10	5
11	3.30.000032	Laporan komoditi potensial yang dipantau	Laporan		0	0	0	6	6
12	3.30.000033	Laporan LPKSM yang aktif	Laporan		0	0	0	0	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
13	3.30.000035	Laporan Pelaku Usaha Ekspor yang telah Dibina	Laporan		2	0	2	2	2
14	3.30.000037	Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Laporan		1	0	0	0	0
15	3.30.000038	Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Laporan		2	0	2	2	2
16	3.30.000039	Laporan pengaduan konsumen yang ditangani	Laporan		0	4	11	3	4
17	3.30.000041	Laporan Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Laporan		2	0	2	2	2
18	3.30.000069	Pelaku Usaha Distribusi Barang yang telah melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota	Pelaku Usaha		3	3	3	3	3
19	3.30.000095	Produk yang telah diterbitkan sertifikasinya	Produk		0	0	0	0	0
20	3.30.000105	Surat Keterangan Asal yang telah dilaporkan untuk diterbitkan	SKA		59	111	88	114	119

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	3.31.000005	Hasil pelaksanaan RPIP dan RPIK	Laporan		0	0	0	0	0
2	3.31.000028	Peninjauan kembali RPIP setiap 5 tahun	Dokumen		0	0	0	0	0
3	3.31.000035	Rekomendasi teknis atas draft Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Dokumen		0	0	0	0	0
4	3.31.000045	Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi	Data		0	0	0	1	1
5	3.31.000046	Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi	Data		0	0	0	1	0
6	3.31.000047	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi	Data		0	1	1	1	1
7	3.31.000048	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data		0	1	1	1	1
8	3.31.000049	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data		0	1	1	1	1
9	3.31.000052	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas	Data		1	1	1	1	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
10	3.31.000054	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan Jumlah investasi	Data		0	0	0	1	1
11	3.31.000055	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data		0	0	0	1	1
12	3.31.000056	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data		0	0	0	1	1
13	3.31.000059	Data perusahaan industri di Provinsi penerima fasilitas	Data		0	1	1	1	1

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	3.32.000001	Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan	Lokasi	Provinsi: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan dan diverifikasi. Kab: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan.	0	0	0	0	0
2	3.32.000002	Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi	Kepala Keluarga	Provinsi: Jumlah Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Kab: Jumlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi administrasi dan teknisnya.	0	0	0	0	0
3	3.32.000003	Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan	Orang	Jumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan dan yang mampu mengimplementasikan hasil pelatihan	0	0	0	0	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	4.01.000001	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1	1
2	4.01.000002	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1	1
3	4.01.000003	Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen		1	1	1	1	1
4	4.01.000004	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen		1	1	1	1	1
5	4.01.000005	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen		1	1	1	1	1
6	4.01.000006	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan		1	1	1	1	1
7	4.01.000007	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen		1	1	1	1	1
8	4.01.000008	Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen		1	1	1	1	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
9	4.01.000009	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen		1	1	1	1	1
10	4.01.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen		1	1	1	1	1
11	4.01.000011	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen		1	1	1	1	1
12	4.01.000012	Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen		1	1	1	1	1
13	4.01.000013	Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen		1	1	1	1	1
14	4.01.000014	Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan		1	1	1	1	1
15	4.01.000015	Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen		1	1	1	1	1
16	4.01.000016	Kerja Sama Badan Usaha/ Swasta yang Difasilitasi	Dokumen		1	1	1	1	1
17	4.01.000017	Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan		1	1	1	1	1
18	4.01.000026	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen		47	54	57	72	36
19	4.01.000027	Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen		435	357	149	538	1945
20	4.01.000055	Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan		1	1	1	1	1
21	4.01.000056	Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen		0	0	0	0	0

Bidang Urusan: Sekretariat DPRD

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	4.02.000001	Dokumentasi DPRD	Dokumen		0	0	0	0	0
2	4.02.000002	Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang		0	0	0	0	0
3	4.02.000004	Publikasi DPRD	Dokumen		0	0	0	0	0
4	4.02.000005	Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan	Dokumen		0	0	0	0	0
5	4.02.000006	Situs resmi dan saluran publikasi DPRD	Dokumen		0	0	0	0	0
6	4.02.000007	Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1
7	4.02.000008	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen		47	12	6	9	1
8	4.02.000011	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen		0	0	0	0	0
9	4.02.000012	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang		0	0	0	0	0
10	4.02.000013	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen		1	1	1	1	1
11	4.02.000014	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen		1	1	1	1	1
12	4.02.000015	Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		1	1	1	1	1
13	4.02.000016	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen		1	1	1	1	1
14	4.02.000017	Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen		2	2	2	2	2
15	4.02.000018	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen		1	1	1	1	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
16	4.02.000019	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan		1	9	20	11	7
17	4.02.000020	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan		1	1	1	1	1
18	4.02.000021	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan		1	1	1	1	1
19	4.02.000022	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan		1	1	1	1	1
20	4.02.000023	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan		1	1	1	1	1
21	4.02.000024	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen		1	1	1	1	1
22	4.02.000025	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen		1	1	1	1	1
23	4.02.000026	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1
24	4.02.000027	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen		1	1	1	1	1
25	4.02.000029	Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang		20	20	20	20	20
26	4.02.000030	Tenaga Ahli Fraksi	Orang		16	16	16	16	16
27	4.02.000031	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen		1	1	1	1	1
28	4.02.000032	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen		3	3	3	3	3
29	4.02.000033	Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen		3	2	2	2	2
30	4.02.000034	Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan		3	3	3	3	3
31	4.02.000035	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen		2	2	2	2	2
32	4.02.000036	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen		3	3	3	3	3
33	4.02.000038	Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen		1	1	1	1	1
34	4.02.000039	Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		2	2	2	2	2
35	4.02.000042	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen		0	0	0	0	0
36	4.02.000043	Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan		0	0	0	0	0
37	4.02.000044	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen		0	0	0	0	0
38	4.02.000045	Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen		0	0	0	0	0
39	4.02.000046	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen		0	0	0	0	0
40	4.02.000047	Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Dokumen		0	0	0	0	0
41	4.02.000048	Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun	Dokumen		1	1	1	1	1
42	4.02.000055	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1
43	4.02.000063	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen		1	1	1	1	1

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	5.01.000001	Aparatur yang menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Orang	Jumlah aparatur yang ditugaskan menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan: 1. JF Perencana 2. JF Statistisi 3. JF Analisis Kebijakan 4. JF Pranata Komputer 5. JF Peneliti	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
2	5.01.000003	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	1	1	1	1	1
3	5.01.000004	Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	1	1	1	1
4	5.01.000006	Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Provinsi. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	1	1	1	1	1
5	5.01.000007	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan	0	0	0	0	0
6	5.01.000009	Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	0	0	0	0	0
7	5.01.000010	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.	0	0	0	0	0
8	5.01.000011	Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan progres pelaksanaan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan SIPD	0	0	0	0	0
9	5.01.000012	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan	0	0	0	0	0
10	5.01.000013	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya	1	0	1	1	1
11	5.01.000014	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya	1	0	1	1	1
12	5.01.000020	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan	2	3	2	1	1
13	5.01.000021	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi. Dokumen dimaksud berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota	22	22	22	22	22
14	5.01.000022	Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun	2	1	1	1	1
15	5.01.000023	Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya. Kerja sama dimaksud dapat	4	2	3	7	4

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				berupa: 1. Pemerintah dengan Pemerintah 2. Pemerintah dengan Non Pemerintah					
16	5.01.000024	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	0	0	0	0	0
17	5.01.000025	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	0	0	0	0	0
18	5.01.000026	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	0	0	0	0	0
19	5.01.000027	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	0	0	0	0	0
20	5.01.000028	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	0	0	0	0	0
21	5.01.000029	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	0	0	0	0	0
22	5.01.000030	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan.	3	2	3	2	3
23	5.01.000031	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0	0	0
24	5.01.000032	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	0	0	0	0	0
25	5.01.000033	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
26	5.01.000034	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	0	0	0	0	0
27	5.01.000035	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	0	0	0	0	0
28	5.01.000036	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	0	0	0	0	0
29	5.01.000037	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur	0	0	0	0	0
30	5.01.000038	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	1	1	1	1
31	5.01.000039	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	1	1	1	1
32	5.01.000040	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	1	1	1	1
33	5.01.000041	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	1	1	1	1
34	5.01.000042	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	1	1	1	1
35	5.01.000043	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	1	1	1	1
36	5.01.000044	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Jumlah aparatur yang dilaksanakan pembinaan terkait pemanfaatan dan dan informasi dalam pembangunan daerah	0	60	60	84	84
37	5.01.000045	Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Jumlah Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	0	0	0	0	0
38	5.01.000046	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	1	1	1	1
39	5.01.000047	Pelaksanaan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kali	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
40	5.01.000048	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
41	5.01.000049	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	0	0	0	0	0
42	5.01.000050	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	0	0	0	0	0
43	5.01.000051	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	0	0	0	0	0
44	5.01.000052	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	0	0	0	0	0
45	5.01.000053	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	0	0	0	0	0
46	5.01.000054	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	0	0	0	0	0
47	5.01.000055	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	0	0	0	0	0
48	5.01.000056	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0	0	0
49	5.01.000057	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	0	0	0	0	0
50	5.01.000058	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian		hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian					
51	5.01.000059	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	0	0	0	0	0
52	5.01.000060	Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	0	0	0	0	0
53	5.01.000061	Peserta Konsultasi Publik	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	0	0	0	0	0
54	5.01.000063	Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0

Bidang Urusan: Keuangan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	5.02.000001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen		2	2	2	2	2
2	5.02.000002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen		2	2	2	2	2
3	5.02.000003	RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		36	36	36	36	0
4	5.02.000004	Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		36	36	36	36	0
5	5.02.000006	Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		36	36	36	36	Kmm 0
6	5.02.000007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen		2	2	2	2	2
7	5.02.000008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen		2	2	2	3	1
8	5.02.000014	Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan		11	11	11	11	10
9	5.02.000016	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan		11	11	11	11	11
10	5.02.000017	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan		11	11	11	10	11
11	5.02.000039	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan		3	3	3	3	3
12	5.02.000041	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Dokumen		2	2	2	2	2

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi							
13	5.02.000062	Standar Harga yang Disusun	Dokumen		134	134	134	134	134
14	5.02.000064	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		36	36	36	0	0
15	5.02.000075	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		4	4	4	4	4
16	5.02.000077	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		1	1	1	1	0
17	5.02.000078	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit		12	12	12	12	12
18	5.02.000079	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		1	1	1	3	1
19	5.02.000080	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		1	1	1	1	0
20	5.02.000081	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen		2	2	2	2	2
21	5.02.000084	Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD		1	1	2	1	2
22	5.02.000086	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		1	1	0	0	1
23	5.02.000156	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		3	3	3	3	3
24	5.02.000160	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan		12	12	0	12	12
25	5.02.000162	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen		2	2	2	2	2
26	5.02.000163	Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen		0	0	0	0	0
27	5.02.000164	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen		0	0	1	1	1

Bidang Urusan: Pendidikan dan Pelatihan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	5.04.000003	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang		0	30	88	515	40
2	5.04.000007	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang		0	0	0	267	0
3	5.04.000009	Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen		0	0	0	3	3
4	5.04.000011	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang		0	656	1.143	632	371
5	5.04.000028	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan		0	0	0	5	0

Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	5.05.000001	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan		0	0	0	0	0
2	5.05.000002	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan		0	0	0	1	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
3	5.05.000003	Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan		0	0	0	0	0
4	5.05.000004	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan		0	0	1	1	0
5	5.05.000005	Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan		0	0	1	0	0
6	5.05.000006	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan		0	0	0	0	0
7	5.05.000007	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan		0	0	0	0	0
8	5.05.000008	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan		0	0	0	0	0
9	5.05.000009	laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan		0	0	0	0	0
10	5.05.000010	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan		0	0	0	0	0
11	5.05.000011	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan		0	0	0	0	0
12	5.05.000012	Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen		0	0	0	0	0
13	5.05.000013	Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi		0	0	0	0	0
14	5.05.000014	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan		0	0	0	0	0
15	5.05.000015	Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	Rekomendasi		0	0	0	0	0
16	5.05.000016	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen		0	0	1	1	0
17	5.05.000017	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen		0	0	0	0	0
18	5.05.000018	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen		0	0	0	0	0
19	5.05.000019	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen		0	0	0	0	0
20	5.05.000020	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen		0	0	1	0	0
21	5.05.000021	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen		0	0	0	0	0
22	5.05.000022	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen		0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
23	5.05.000023	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen		0	0	0	0	0
24	5.05.000024	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen		0	0	0	0	0
25	5.05.000025	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen		0	0	1	1	0
26	5.05.000026	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen		0	0	0	0	0
27	5.05.000027	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen		0	0	0	0	0
28	5.05.000028	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen		0	0	0	0	0
29	5.05.000029	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen		0	0	0	0	0
30	5.05.000030	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen		0	0	2	0	1
31	5.05.000031	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen		0	0	1	2	0
32	5.05.000032	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen		0	0	0	0	1
33	5.05.000033	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen		0	0	0	0	0
34	5.05.000034	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen		0	0	0	0	0
35	5.05.000035	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen		0	0	0	0	0
36	5.05.000036	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen		0	0	0	1	1
37	5.05.000037	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen		0	0	0	0	0
38	5.05.000038	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen		0	0	0	0	0
39	5.05.000039	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen		0	0	0	0	0
40	5.05.000040	Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen		0	0	0	0	0
41	5.05.000041	Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan		0	0	0	0	0
42	5.05.000042	Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan		0	0	0	1	1
43	5.05.000043	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan		0	0	0	0	0
44	5.05.000044	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan		0	0	0	0	0
45	5.05.000048	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan		0	0	0	0	0
46	5.05.000051	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan		0	0	0	1	0

Bidang Urusan: Pengelolaan Perbatasan

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	5.06.000001	Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1
2	5.06.000002	Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen		1	1	1	1	1
3	5.06.000003	Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Dokumen		1	1	1	1	1
4	5.06.000004	Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen		0	0	0	0	0
5	5.06.000005	Dokumen Hasil Fasilitas Penegakan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Dokumen		0	0	0	0	0
6	5.06.000006	Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Dokumen		1	1	1	1	1
7	5.06.000007	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen		1	1	1	1	1
8	5.06.000008	Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen		1	1	1	1	1
9	5.06.000009	Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		0	0	0	0	0
10	5.06.000012	Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen		0	0	0	0	0
11	5.06.000014	Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen		0	0	0	0	0
12	5.06.000015	Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen		0	0	0	0	0
13	5.06.000016	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan		0	0	0	0	0
14	5.06.000018	Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan Negara	Dokumen		0	0	0	0	0
15	5.06.000019	Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	Dokumen		0	0	0	0	0
16	5.06.000020	Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen		0	0	0	0	0
17	5.06.000021	Laporan Fasilitas Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Laporan		0	0	0	0	0
18	5.06.000034	Hasil Fasilitas dan koordinasi kerjasama antar negara	Dokumen		0	0	0	0	0
19	5.06.000035	Hasil Koordinasi Penyelesaian Batas Wilayah Negara.	Dokumen		0	0	0	0	0
20	5.06.000036	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Laporan		0	0	0	0	0
21	5.06.000037	Hasil Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Laporan		0	0	0	0	0
22	5.06.000038	Hasil Fasilitas Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara	Laporan		0	0	0	0	0
23	5.06.000039	Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasaan Negara yang Disusun	Dokumen		0	0	0	0	0

Bidang Urusan: Pengelolaan Penghubung

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	5.07.000001	Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan		0	0	0	1	1
2	5.07.000002	Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan		0	0	0	1	5
3	5.07.000003	Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan		0	0	0	4	4
4	5.07.000004	Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan		0	0	0	4	4
5	5.07.000005	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan		0	0	0	1	1

Bidang Urusan: Inspektorat Daerah

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	6.01.000001	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		1	1	1	1	1
2	6.01.000002	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan		0	0	0	0	0
3	6.01.000003	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan		1	1	1	1	1
4	6.01.000004	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan		1	1	1	1	1
5	6.01.000005	Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan		11	11	11	11	11
6	6.01.000006	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan		1	1	1	1	0
7	6.01.000007	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen		1	1	1	1	1
8	6.01.000008	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan		0	0	0	0	0
9	6.01.000009	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		1	1	1	1	1
10	6.01.000010	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		1	1	1	1	1
11	6.01.000011	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		0	0	0	0	0
12	6.01.000012	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		1	1	1	1	10
13	6.01.000013	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah		1	1	1	1	1
14	6.01.000014	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan		3	3	3	3	3
15	6.01.000015	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah		1	1	1	1	1
16	6.01.000020	Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan		0	0	0	0	0

Bidang Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6				
1	8.01.000001	Anggota Paskibraka	Orang	Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
				tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.					
2	8.01.000002	Calon Paskibraka	Orang	Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka	0	0	0	0	0
3	8.01.000003	Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Dialog Interaktif dan Diskusi bersama untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada para calon anggota paskibraka	0	0	0	0	0
4	8.01.000004	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Kegiatan	Memberikan ruang aktivitas, pelatihan, pengajaran, dan sosialisasi bagi anggota paskibraka dan anggota purnapaskibraka untuk meningkatkan pemahaman terkait ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, serta siap untuk menjadi generasi muda yang menjadi contoh dari generasi muda lainnya dalam membangun NKRI	0	0	0	0	0
5	8.01.000005	Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unit	Forum Dialog dan Pelatihan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Calon Aggota Paskibraka dan Anggota Paskibraka	0	0	0	0	0
6	8.01.000006	Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka	Orang	Penyediaan kebutuhan administrasi, seleksi, dan pelatihan calon anggota paskibraka	0	0	0	0	0
7	8.01.000007	Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Kegiatan Forum dialog, diskusi interaktif, dll terkait pemberian pembinaan lanjutan terkait pancasila dan wawasan kebangsaan bagi anggota purna paskibraka duta pancasila	0	0	0	0	0
8	8.01.000008	Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para calon anggota paskibraka dalam proses rekrutment dan seleksi	0	0	0	0	0
9	8.01.000009	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para anggota paskibraka dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera	0	0	0	0	0
10	8.01.000010	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana, serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas purna paskibraka duta pancasila	0	0	0	0	0
11	8.01.000011	Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Unit	Penyediaan ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota paskibraka dan purnapaskibraka	0	0	0	0	0
12	8.01.000012	Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Pemberian ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota purna paskibraka duta pancasila	0	0	0	0	0
13	8.01.000013	Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan seleksi dan pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila	0	0	0	0	0
14	8.01.000014	Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	para pelatih dan pengajar dalam memberikan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
15	8.01.000015	Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan fasilitator dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	0	0	0	0	0
16	8.01.000016	Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	0	0	0	0	0
17	8.01.000017	Pamong/Pengasuh	Orang	Para pamong dan pengasuh anggota paskibraka selama pelatihan	0	0	0	0	0
18	8.01.000018	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka	Orang	Panitia dalam proses seleksi dan rekrutment calon anggota paskibraka	0	0	0	0	0
19	8.01.000019	Pelatih Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	0	0	0	0	0
20	8.01.000020	Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan pembentukan karakter kebangsaan	0	0	0	0	0
21	8.01.000021	Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa)	0	0	0	0	0
22	8.01.000022	Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga)	0	0	0	0	0
23	8.01.000023	Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kepemimpinan	0	0	0	0	0
24	8.01.000024	Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi	0	0	0	0	0
25	8.01.000025	Peserta Calon Paskibraka	Orang	penyediaan sarana, prasarana, dan kebutuhan calon anggota paskibraka	0	0	0	0	0
26	8.01.000026	Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka dalam melaksanakan diskusi pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	0	0	0	0	0
27	8.01.000027	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para anggota dan anggota purnapaskibraka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	0	0	0	0	0
28	8.01.000028	Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Pembiayaan terkait kebutuhan peserta dalam pembinaan lanjutan kepada purnapakibraka duta pancasila	0	0	0	0	0
29	8.01.000029	Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Pembiayaan untuk peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	0	0	0	0
30	8.01.000030	Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Pembiayaan untuk peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	0	0	0	0
31	8.01.000031	Purnapaskibraka	Orang	pembentukan purnapaskibraka	0	0	0	0	0
32	8.01.000032	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Penangkatan, penetapan, dan pelantikan purnapaskibraka duta pancasila	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
33	8.01.000033	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Pembiayaan terkait penyediaan ruang diskusi dengan pembelajaran terkait Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	0	0	0	0
34	8.01.000034	Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi	Orang	Pembiayaan terkait Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka	0	0	0	0	0
35	8.01.000035	Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, kebutuhan dan honor Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0	0	0	0	0
36	8.01.000036	Training of Trainer Kepamongan	Kegiatan	Penyelenggaraan TOT Kepamongan bagi Anggota Paskibraka dan Anggota Purnapaskibraka	0	0	0	0	0
37	8.01.000037	Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi dalam pembentukan paskibraka	0	0	0	0	0
38	8.01.000038	Transportasi pada pembentukan paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi pada pembentukan paskibraka	0	0	0	0	0
39	8.01.000039	Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transport pelaksana tugas paskibraka	0	0	0	0	0
40	8.01.000040	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Penyediaan ruang diskusi dan dialog terkait penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0	0	2	6	3
41	8.01.000041	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Penyediaan forum dialog dan diskusi, serta sosialisasi terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100A	80	100	255	264
42	8.01.000042	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Penyediaan forum diskusi dan dialog terkait Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	90	90	43	607	187
43	8.01.000043	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	Pelaksanaan Monev dan Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	3	4	4	6
44	8.01.000044	Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	Pelaksanaan kegiatan forum diskusi terkait Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	0	0	0	0
45	8.01.000045	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Pembentukan dan Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0	0	0	0
46	8.01.000046	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0	0	0	0	0

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
47	8.01.000047	Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0	0	0	0	0
48	8.01.000048	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0	0	0	0
49	8.01.000049	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0	0	0	0
50	8.01.000050	Paskibraka	Orang	Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila	0	0	0	0	0
51	8.01.000051	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1	1	1	1	1
52	8.01.000052	Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Daftar Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0	0	3	5	3
53	8.01.000053	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertama (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60	65	375	150	60
54	8.01.000054	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertama (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi, bimtek, pelatihan terkait koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	10	0	236	2
55	8.01.000055	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Sebelumnya	8	3	4	5	2
56	8.01.000057	Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Dokumen	Daftar dan Lampiran Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	0	1	1	7	2

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun					
57	8.01.000059	Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (dalam 3 Tahun Terakhir)	0	0	0	0	0
58	8.01.000061	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1	1	1	1	1
59	8.01.000062	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Daftar Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0	0	0	0	0
60	8.01.000063	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimpek Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (3 Tahun Terakhir)	0	0	0	0	0
61	8.01.000064	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)	0	200	110	50	32
62	8.01.000065	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)	0	0	0	0	0
63	8.01.000066	Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Tahun Sebelumnya)	1	1	1	1	1
64	8.01.000067	Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Daftar Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (tiga tahun terakhir)	0	0	1	5	1

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
65	8.01.000068	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200	100	150	137	100
66	8.01.000069	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70	50	50	481	100
67	8.01.000070	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya)	5	4	6	4	1
68	8.01.000071	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (SK Keanggotaan, laporan Kegiatan tahun sebelumnya)	1	1	1	2	1
69	8.01.000072	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Renja dan Lopran Kinerja Tahun Sebelumnya)	1	1	1	1	1
70	8.01.000073	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Jumlah dan Daftar Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tiga Tahun Sebelumnya)	0	0	2	6	0
71	8.01.000075	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi (Diklat, Sosialisasi, Pelatihan dll) di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	100	100	607	0
72	8.01.000088	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kegiatan	Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan pelaksanaan Tugas paskibraka Tahun Sebelumnya	0	0	0	0	0
73	8.01.000089	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Kinerja Capaian Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1	1	1	1	1
74	8.01.000091	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Orang	Daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Kursus, dan/atau Pelatihan Pelaksanaan	0	40	75	209	2

No	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	Nilai				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
75	8.01.000093	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Tahun Sebelumnya)	0	0	4	4	4
76	8.01.000094	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tahun Sebelumnya)	1	1	1	1	1
77	8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda)	0	0	0	0	0

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Mei 2025

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


HENDRIK LEWERISSA